

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA
MONEY POLITIC

**(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor:
32/Pid.Pemilu/2017/PT.Btn)**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana dan Politik Islam

Disusun oleh:

Evi Nur Fitria
NIM:1402026011

JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2018

Dr. Rokhmadi, M.Ag

Alamat: Jl. Jatiluhur 318 Rt.01 Rw. 05 Ngesrep Banyumanik Semarang

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag. MH

Alamat: Karang Malang Lor Rt. 04 Rw. 05 Sumpersari Ngampel Kendal

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
a.n Saudari Evi Nur Fitria

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Evi Nur Fitria

NIM : 1402026011

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Money Politic (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 32/Pid.Pemilu/2017/PT. Btn)"**

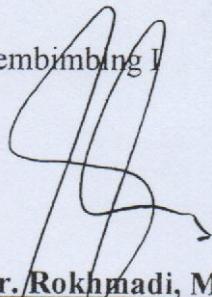
Dengan ini kami memohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 01 Maret 2018

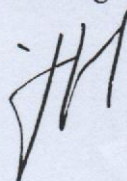
Pembimbing I



Dr. Rokhmadi, M.Ag

NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing II



Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag. MH

NIP. 19730821 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Evi Nur Fitria
NIM : 1402026011
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana *Money Politic*
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Baanten Nomor: 32/Pid.Pemilu
/2017/PT. Btn)"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :

05 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 09 Maret 2018

Ketua Sidang/Penguji

Drs. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1 002

Penguji Utama I

Dr. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004



Penguji Utama II

Moh. Khasan, M. Ag
NIP. 19741212 200312 1 004

Pembimbing I

Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing II

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag. MH
NIP. 19730821 200003 1 002

MOTTO

وعن ثوبان قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي و المرتشي والرائش " يعني: الذي يمشي

بينهما (رواه أحمد والحكم)

“Dari Tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya” (HR. Ahmad dan Hakim).¹

¹ Muhammad bin Ismail Kahlani Ash-Sau'ani, *Subul As-salam* (Bandung: Dahlan,tt), hlm. 43.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- *Bapak, Ibu Penulis, yang ku sayangi & cintai, terimakasih untuk semua yang telah kalian berikan kepada Penulis selama ini. Semoga amal dan jasa kalian selalu diterima Allah SWT. Amin. Doa dan Ridlo Bapak Ibu selalu Penulis harapkan.*
- *Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing, mendidik dan membuka wawasan ilmu kepada Penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga amal dan jasa Beliau semua diterima oleh Allah SWT. Amin..*
- *Teman-teman seperjuangan SJ 2014*
- *Teman-teman KKN posko 55 angkatan ke-69 Desa Mutih Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.*
- *Teman-teman kos Umi Zahrah*
- *Saudaraku Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DPC Semarang.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa:
Skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis penulis lain atau diterbitkan.
Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran penulis lain, kecuali
informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 27 Februari 2018
Deklarator,



Evi Nur Fitria
1402026011

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H ·	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es

ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘āqqidīn*

عدة ditulis *‘iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

__ا__ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

____(kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

__و__ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	ditulis	<i>majīd</i>
------	---------	--------------

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
-------	---------	----------------

اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
------	---------	----------------

لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
-------	---------	------------------

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
--------	---------	-----------------

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

ABSTRAK

Pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di Indonesia diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Namun dalam pelaksanaannya pilkada seringkali dinodai oleh penyimpangan dengan menggunakan cara yang kotor, cara kotor tersebut salah satunya dengan transaksi jual beli suara atau dikenal dengan istilah *money politic*. *Money politic* merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang. Sebagaimana tercantum dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Selama pilkada tahun 2017 *money politic* pernah terjadi di Banten. Sebagaimana dalam putusan Nomor 32/Pid.Pemilu/2017/PT.Btn majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten memutus terdakwa Hidayat Wijaya Dipura telah terbukti melakukan perbuatan *money politic*, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pidana penjara tersebut lebih rendah bahkan dibawah ketentuan hukuman minimum pasal 187A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor: 32/Pid.Pemilu/2017/PT.Btn. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pidana bagi pelaku *money politic* dalam putusan Nomor: 32/Pid.Pemilu/2017/ PT.Btn.

Kajian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 32/Pid.Pemilu/2017/PT.Btn sebagai data primer dan peraturan perundang-undangan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam sebagai data sekunder, sedangkan analisis data menggunakan analisis diskriptif.

Hasil dari penelitian ini dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan Nomor: 32/Pid.Pemilu/2017/PT.Btn melihat dari segi hukum (*yuridis*) berupa putusan tingkat pertama, memori banding terdakwa, dan kontra memori banding jaksa penuntut umum. Sedangkan dari segi non hukum (*non yuridis*) berupa terdakwa berada dalam posisi terbawah dari rantai *money politic*. Selain itu putusan tersebut juga mengacu kepada putusan rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015, yang pada pokoknya memberikan peluang kepada hakim untuk memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Sedangkan dalam hukum Islam *money politic* merupakan *jarīmah ta'zīr*, karena tidak diatur secara eksplisit dalam *nās-nās syar'ī*, baik Al-Qur'an maupun Sunnah. Sebagai *jarīmah ta'zīr* maka hukumannya merupakan kewenangan pemerintah untuk menentukan, termasuk juga kewenangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten yang menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan Nomor 32/Pid.Pemilu/2017/PT.Btn.

Kata Kunci: Pilkada, money politic, jarīmah ta'zīr

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa spirit perubahan sosial (*social of change*) berupa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari tatanan eksploitatif, perbudakan, tirani untuk menuju tatanan yang berkeadilan sosial dan dalam naungan Allah SWT.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
3. Drs. Sahidin, M, Si, Dr. Agus Nurhadi, M.A, Moh. Arifin, S.Ag., M. Hum. Selaku Wakil Dekan.
4. Dr. Rokhmadi, M. Ag, selaku Kajur *Jinayah Siyasah* dan Bapak Rustam Dohar Karnadi Apolo Harahap, M.Ag selaku Sekjur *Jinayah Siyasah*.
5. Dr. Rokhmadi, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini serta selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag. M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu penulis, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk mencapai keberkahan
8. Teman-teman SJ 2014 atas kebersamaan kalian dalam susah dan senang selama 4 (empat) tahun ini.
9. Temen-temen kos Umi Zahrah terima kasih atas semangat dan bantuannya selama ini.
10. Saudaraku Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DPC Semarang atas 3 (tiga) tahun pengalaman yang kalian berikan.

Kepada semua, penulis mengucapkan terima kasih, turut serta do'a semoga budi baik semuanya diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. *Amiin*.

Akhirnya, semoga apa yang telah penulis kerjakan mendapat ridla Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi seluruh ummat pada umumnya dan diri penulis khususnya

Semarang, 27 Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II :TINJAUAN UMUM TENTANG *MONEY POLITIC*

A. Pengertian <i>Money Politic</i>	22
B. Bentuk-Bentuk <i>Money Politic</i>	24
C. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Money Politic</i>	26
D. Dampak <i>Money Poltic</i>	33
E. <i>Money Politic</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	35

F. <i>Money Politic</i> dalam Hukum Islam.....	38
BAB III : SANKSI PIDANA <i>MONEY POLITIC</i> DALAM PUTUSAN	
PENGADILAN TINGGI BANTEN NOMOR: 32/PID.	
PEMILU/2017/PT.BTN	
A. Posisi Kasus.....	53
B. Dakwaan dan Tuntutan.....	57
C. Putusan.....	62
BAB IV : ANALISIS <i>MONEY POLITIC</i> DALAM PUTUSAN	
PENGADILAN TINGGI BANTEN NOMOR: 32/PID.	
PEMILU/2017/PT.BTN.	
A. Aspek Tindak Pidana atau <i>Jarīmah</i>	78
B. Aspek Hukuman atau <i>‘Uqūbah</i>	84
BAB V : PENUTUP.	
A. Simpulan	91
B. Saran.....	92
C. Penutup.....	93
DAFTAR PUSTAKA.	
RIWAYAT HIDUP.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.² Pemilihan Umum atau selanjutnya disebut pemilu merupakan instrumen penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Dengan pemilu diharapkan negara dan warga negara menjalankan kewajiban agar hak-hak ekonomi, dan hak-hak politik dapat terjamin. Dengan pemilu juga diungkap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Atribut-atribut data yang melekat pada individu pemilih, daerah pemilihan memberikan gambaran yang lebih luas kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Untuk itu data tidak saja berguna untuk analisis politik, tetapi juga fenomena sosial terkait dengan perencanaan pembangunan daerah.³

Hakekatnya pemilu merupakan polling "paling lengkap" karena melibatkan seluruh warga negara yang benar-benar punya hak pilih, tidak seperti polling yang menggunakan sampel. Dengan pemilu diharapkan masyarakat dapat mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan

² Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 25.

³ Soni Kurniawan dkk, "Laporan riset dengan tema: *Tingkat Melek Politik Warga Dalam pemilu 2014 Di Kabupaten Belitung* ", 2014, hlm. 1

politikus ataupun pegawai negeri, dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara atau pun partai yang berkuasa.⁴

Dalam perspektif demokrasi, pemilu memiliki beberapa manfaat. *Pertama*, pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi mempunyai asumsi bahwa kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.

Kedua, pemilu merupakan sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat ataupun kepala Negara atau Daerah.

Ketiga, pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.

⁴*Ibid.*

Keempat, pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.

Kelima, pemilu merupakan sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan.⁵

Pemilu di Indonesia tak hanya berlangsung untuk memilih presiden dan anggota perwakilan di parlemen saja, namun pemilu kini juga digunakan dalam pemilihan kepala daerah selanjutnya disebut pilkada, bahkan sistem pemilihan umum juga digunakan oleh masyarakat mulai dari memilih pimpinan pada tingkat paling kecil, seperti ketua RT/RW, dan kepala desa. Fenomena ini tak lepas dari kuatnya pengaruh gelombang demokratisasi yang melanda Indonesia semenjak tahun 1998.

Namun berdasar pelaksanaannya penerapan demokrasi dalam pemilu itu sendiri seringkali dinodai oleh penyimpangan-penyimpangan dengan

⁵ Jhon Markof, *Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Social dan Perubahan Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 206

menggunakan cara yang kotor, cara kotor tersebut yaitu dengan transaksi jual beli suara atau dikenal dengan istilah *money politic*. Secara umum *money politic* didefinisikan sebagai suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. *Money politic* adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Praktik *money politic* dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.⁶

Money politic muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat). Keduanya saling mendapatkan keuntungan dengan mekanisme *money politic*. Bagi politisi, *money politic* merupakan media instan yang dengan cara itu suara konstituen dapat dibeli. Sebaliknya, bagi rakyat, *money politic* ibarat bonus rutin di masa pemilu yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan.⁷ Dalam hal ini tindakan *money politic* itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya. Praktik *money politic* dapat disamakan dengan uang sogok alias suap, tapi tidak semua kalangan berani secara tegas menyatakan haram. Menurut pendapat Rusdji Hamka sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan,⁸ praktik *money politic* tidak berbeda dengan suap, karena itu haram hukumnya.

⁶ Indra Ismawan. *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Media Presindo. 1999), hlm. 35.

⁷ *Ibid.*

⁸ Indra Ismawan. *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Media Presindo. 1999), hlm. 35.

Penggunaan *money politic* ini dalam usaha pemenangan pada sistem pemilu sangatlah sulit untuk melihat pergerakannya, kita hanya bisa melihat bentuk dari *money politic* tersebut namun sangatlah sulit untuk melihat proses *money politic* tersebut. Untuk mencari, merebut dan mempertahankan kekuasaan politik tentu tidak bisa dipisahkan dengan *money politic*. Apalagi sistem pemilu yang langsung dengan jumlah pemilih yang banyak sehingga semakin banyak pemilih tentunya ongkos politik dan *money politic*nya berbanding lurus. Untuk memperoleh kekuasaan, orang rela membayar berapapun biayanya.⁹

Tindakan *money politic* sangat bertentangan dengan ide dasar demokrasi yaitu sebagai pilihan yang mandiri dan rasionalitas. Bila pilihan masyarakat terkontaminasi karena pemberian uang dan materi maka ide demokratisasi pemilu gagal, dan yang kita khawatirkan akan terjadi korupsi yang massif, yang dilakukan oleh pasangan calon terpilih. Oleh karena itu apapun alasan dan penggunaannya aktivitas transaksi pembelian suara dalam proses pemilihan harus kita hindari dan kita hapus serta supremasi hukum harus ditegakkan.¹⁰

Di Indonesia *money politic* terjadi dalam semua lingkup pemilihan umum, salah satunya dalam pilkada, dalam pilkada telah diatur dengan jelas dalam pasal 73 ayat (1) dinyatakan: “Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk

⁹ Faris Nadisa Rahman, Turtiantoro dan SusiloUtomo, “Makalah: *Persepsi Pengaruh Money Politic dan Jaringan Sosial terhadap Perilaku Pemilih pada Kemenangan Pasangan Calon dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM dan wakilnya H. Mukh Mustamsikin, S.Ag, M.SI., (YAKIN) Studi Kasus Pemilukada kab.Kendal tahun 2010*” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 3.

¹⁰ *Ibid.*

mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.”Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang”, selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Aturan tentang *money politic* sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 namun praktek *money politic* biasanya sulit untuk ditindak atau dikenai hukuman. Selain itu, perbuatan *money politic* jarang sekali yang mendapat hukuman kecuali pelaku sudah ketangkap basah oleh penegak hukum. Disisi lain *money politic* juga menguntungkan kedua belah pihak baik kandidat maupun rakyat sama-sama membutuhkannya. Sepanjang tidak ada unsur pemaksaan dan intimidasi atau bentuk-bentuk kekerasan politik lainnya, Pelaku yang tidak tertangkap akan sulit melacaknya, apalagi jika mempertimbangkan suatu klausul bahwa calon pemilih bisa saja menerima pemberian uang oleh kandidat atau tim suksesnya, namun dia bebas menentukan pilihannya. Klausul inilah yang biasanya dianggap sebagai “jalan kompromi” untuk menoleransi *money politic* ditengah berlakunya hukum ekonomi pilkada, yaitu adanya *supply and demand* antara pihak kandidat dan pemilih.¹¹

Selama tahun 2017 telah terjadi beberapa pemilihan kepala daerah dan kasus *money politic* tidak lepas dari pilkada tersebut, salah satunya yang

¹¹ Amirudin dan Zaini Bisri, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 4.

terjadi di Banten. Ketua dari tim pendukung calon nomor 1 (satu) yaitu Hidayat Wijaya Dipura terindikasi melakukan tindak pidana *money politic* karena menyuruh anggota timnya untuk membagikan kantong plastik besar berisi 25 (dua puluh lima) kantong plastik kecil yang masing-masing kantong plastik kecil berisi 5 (lima) bungkus mie instan dan 1 (Satu) lembar flyer bergambar pasangan calon Gubernur nomor urut 1 (satu) atas nama Wahidin Halim-Andika Hazrumi dengan tujuan agar masyarakat memberikan hak suaranya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam kasus ini majelis hakim Pengadilan Negeri Banten sama halnya dengan majelis hakim Pengadilan Tinggi Serang memutus terdakwa dengan pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹²

Dengan menggunakan pasal tersebut diatas. Majelis hakim Pengadilan Negeri Serang memutus terdakwa Hdayat Wijaya Dipura dipidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan pidana denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹³ Putusan tersebut sesuai dengan batas minimum khusus yang terdapat dalam pasal tersebut. Namun setelah putusan di tingkat pertama terdakwa langsung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten dan hasil putusan dari hakim Pengadilan Tinggi Banten menyatakan bahwa

¹² Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, berbunyi:“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (4) dipidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Selanjutnya pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berbunyi:“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Serang No: 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/ PN.Srg, hlm: 35-36

terdakwa dipidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹⁴

Berdasarkan keterangan diatas amar putusan yang terdapat di Pengadilan Tinggi Banten dengan Pengadilan Negeri Serang berbeda 24 (dua puluh empat) bulan dengan keterangan putusan di tingkat dua lebih ringan dari yang ada di tingkat pertama. Selain itu amar putusan di tingkat kedua untuk pidana penjara menyimpangi batas minimum dari pasal yang digunakan majelis hakim tingkat banding dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yaitu pasal 187A ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 tahun 2016. Oleh sebab itu penulis sangat tertarik menganalisis putusan yang ada di tingkat dua tersebut, karena dengan menggunakan pasal dan undang-undang yang sama dapat menghasilkan putusan yang berbeda.

Selain hukum positif dalam hukum Islam sendiri *money politic* juga dilarang dan perbuatannya termasuk dalam kategori *risywah*, sebagaimana telah diketahui bahwasanya, Rasulullah Saw menjelaskan dalam hadisnya yang berbunyi :

وعن ثوبان قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي و المرتشي والرائش "يعني: الذي يمشي بينهما (رواه أحمد والحكم)

“Dari tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya” (HR. Ahmad dan Hakim).¹⁵

¹⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Banten 32/Pid.Pemilu/2017/PT.Btn, hlm: 18-20

¹⁵ Muhammad bin Ismail Kahlani Ash-Sau'ani, *Subul As-salam* (Bandung: Dahlan,tt), hlm. 43.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1999 bahwasanya suap (*risywah*) dalam bentuk apapun tetap tidak diperbolehkan, pemberian hadiah atau hibah boleh dilakukan dan diberikan kepada siapa saja, namun jika pemberian itu bersifat memaksa dan mengikat tidak lagi dinamakan hadiah atau hibah.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin membahas apa yang membuat sanksi pidana pelaku *money politic* sebagaimana diatur dalam pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak selalu ditaati oleh penegak hukum seperti dalam putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 32/Pid.Pemilu/2017/PT.BTN, dan bagaimana sanksi pidana pelaku *money politic* khususnya dalam hukum pidana Islam, Dengan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana *Money Politic* (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 32/Pid.Pemilu/2017/PT.Btn).**

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah yang telah ditemukan diatas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap sanksi pidana *money politic* dalam putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 32/Pid.Pemilu/2017/PT.Btn?

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *101 Masalah Hukum Islam, Sebuah Produk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, (Surabaya: Pustaka Da'i Muda dan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Jawa Timur, 2003), hlm. 222

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana pelaku *money politic* dalam putusan di Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 32/Pid. Pemilu/2017/PT.Btn?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum terhadap sanksi pidana *money politic* dalam putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 32/Pid. Pemilu/2017/PT.Btn.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana pelaku *money politic* dalam putusan di Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 32/Pid. Pemilu/2017/PT.Btn.

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan kemampuan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada, khususnya masalah yang berkaitan dengan aspek hukum pidana tentang *money politic*.

b. Kegunaan Secara Praktis

Sebagai sarana bagi penulis untuk memperdalam ilmu hukum pidana dan memberikan kontribusi atau masukan sebagai bahan

pemikiran bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *money politic*. Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelitian atau tinjauan terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka berfungsi sebagai perbandingan dan tambahan informasi terhadap penelitian yang hendak dilakukan. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Pertama skripsi karya Dico Primatara Marga Putra mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang berjudul: “*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Calon Anggota Legislatif yang Melakukan Politic Uang (Money Politic) Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum (Studi Putusan No. 34/pid.B/2014/PN.LW)*”. Skripsi tersebut menyatakan bahwa, Penerapan sanksi pidana terhadap calon anggota legislatif yang melakukan *money politic* didasarkan pada Pasal 301 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada hanya saja sanksi yang diberikan masih kurang berat yakni terdakwa dikenai sanksi dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan majelis

hakim karena terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 bulan berakhir dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 6.000.000,00. Namun untuk penerapan sanksi pidana di atas dipandang telah sesuai dengan pidana maksimal berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) yakni pidana penjara maksimal selama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00.¹⁷

Kedua, tesis karya Mike Nur Hidayah mahasiswi program studi Ilmu Hukum Universitas Jember, yang berjudul *“Tindak Pidana Pemilu Berkaitan dengan Money politic pada PEMILUKADA di Jawa Timur Tahun 2008 (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No: 41/PHPU.D-VI/2008)*. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 terdapat pelanggaran secara administratif dan pelanggaran pidana yang sistematis, terstruktur dan masif. Fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945. Tindak pidana yang telah dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif yang tercantum didalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.DVI/2008 harus diajukan ke pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana tersebut harus diajukan melalui proses peradilan umum, ada tindakan yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana

¹⁷ Dico Primatara Marga Putra, *“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Calon Anggota Legislatif yang Melakukan Politic Uang (Money Politic) Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum (Studi Putusan No. 34/pid.B/2014/PN.LW)*. (Lampung: Universitas Lampung, 2015), hlm.63.

(*official criminal justice system*) sehingga mampu menciptakan rasa keadilan pada masyarakat. Putusan sela berupa pemilihan ulang di beberapa kabupaten yang tertuang dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tidak dapat menghapus unsur tindak pidana *money politic* karena walaupun putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final namun tindak pidana yang telah dilakukan oleh pasangan calon pemilu kepala daerah harus diproses lebih lanjut melalui peradilan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Ketiga, skripsi karya Ananta Bagus Perdana mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Money Politic yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2014 (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta)*. Hasil penelitian menemukan: (1) Bentuk-bentuk *money politic* yang dilakukan oleh calon legislatif di Surakarta pada Pemilu 2014: (a) secara langsung praktik *money politic* dapat berupa uang atau barang. Pada kenyataannya *money politic* dalam bentuk uang yang paling sering dilakukan oleh para caleg. *Money politic* secara langsung dapat berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses" (b) *Money politic* secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *doorprize*, pembagian sembako, dan dana bantuan secara individual atau kelompok. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *money politic*, Adanya keinginan seseorang untuk menjadi anggota dewan, ingin memiliki kekuasaan, dan sikap masyarakat yang menerima

¹⁸ Mike Nur Hidayah (100720101016) "*Tindak Pidana Pemilu Berkaitan dengan Money politic pada PEMILUKADA di Jawa Timur Tahun 2008 (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No: 41/PHPU.D-VI/2008)*.(Jember: Universitas Negeri Jember, 2013), hlm. xi

pemberian dari caleg, serta partisipasi masyarakat menolak *money politic* kurang. (3) Realita penanganan kasus praktik *money politic* dalam Pemilu legislatif 2014 di Surakarta tidak dapat ditindaklanjuti karena kurangnya bukti. (4) Kendala-kendala yang ditemui dalam penegakan hukum pada kasus praktik *money politic* pemilu legislatif 2014 di Surakarta dari undang-undang, panwaslu kesulitan menemukan bukti, dan kurang partisipasi masyarakat.¹⁹

Keempat, skripsi karya Moh Mahfudhi mahasiswa Perbandingan Madzab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Senan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “*Money Politic (Prespektif Hukum Islam dan Positif)*”. Hasil penelitian menemukan bahwa hukum Islam dan Hukum Positif memandang *money politic* sebagai perbuatan yang dilarang dan akibat perbuatan tersebut pelaku dapat dihukum oleh hakim sesuai undang-undang yang berlaku, dalam Hukum Positif perbuatan *money poltic* diatur dalam pasal 87 Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu dan dalam hukum Islam *money politik* dikategorikan sebagai *risywah*.²⁰

Kelima, Laporan Partisipatory Action Research (PAR) karya Nur Syamsudin, Brilliyani Erna Wati, dan Nur Hidayati Setyani dosen Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, yang berjudul “*Pemberdayaan dan Perubahan Perilaku Politik Masyarakat terhadap Politik uang dalam Pemilihan Umum di Kota Semarang*”. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Pemetaan masalah politik uang yang selalu

¹⁹Ananta Bagus Perdana (C100080080), “*Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Money Politics yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2014 (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta)*”. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), hlm. v

²⁰ Moh Mahfudhi (05360063), “*Money Politic (Prespektif Hukum Islam dan Positif)*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), hlm. 98

terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu mempunyai beragam modus operandi. Modus operandi yang paling diminati masyarakat adalah pemberian uang tunai secara langsung, karena lebih mudah untuk digunakan oleh para penerima. (2) Maraknya politik uang yang terjadi setiap penyelenggaraan pemilihan umum, meskipun dirasakan dan nyata terjadi di lapangan, tetapi sangat susah untuk dibuktikan secara hukum. Hal ini disebabkan tidak tercapainya 4 (empat) kriteria politik uang, yaitu ada saksi, ada bukti, ada ajakan untuk memilih caleg tertentu, dan pemberi adalah caleg atau tim sukses yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). (3) Untuk meminimalisir praktik politik uang dalam pemilu perlu dirumuskan beberapa program, antara lain perlu upaya pencegahan dengan menjalankan moratorium (penghentian) politik uang oleh partai politik dan kandidat, perlu sosialisasi dan pendidikan politik kepada rakyat, perubahan peraturan perundang-undangan, gerakan bersama, penyuluhan dan khutbah jum'at, serta pemilihan tidak langsung (khusus pilkada). (4) Presepsi masyarakat terhadap politik uang didasarkan pada pemahaman bahwa demokrasi dan pemilu dipandang sebagai bagian dari ikhtiar untuk mendapatkan kekuasaan; masyarakat tidak memahami dan menjalankan ajaran agama dengan baik berkenaan dengan keharaman politik uang serta adanya pengaruh liberalisasi politik global.²¹

Pembedaan diantara penelitian dahulu dan penelitian penulis nampak dalam matrik dibawah ini:

²¹ Nur Syamsudin dkk *"Pemberdayaan dan Perubahan Perilaku Politik Masyarakat terhadap Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Kota Semarang"*, (Semarang: IAINWalisongo Semarang, 2014), hlm. 183-185.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Obyek kajian
1.	Dico Primatara Marga Putra	<i>“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Calon Anggota Legislatif yang Melakukan Politic Uang (Money Politic) Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum (Studi Putusan No. 34/pid.B/2014/PN.LW).”</i>	Kesesuaian sanksi pidana pelaku <i>money politic</i> dalam putusan No. 34/pid.B/2014/PN.LW dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2.	Mike Nur Hidayah	<i>“Tindak Pidana Pemilu Berkaitan dengan Politik Uang pada PEMILUKADA di Jawa Timur Tahun 2008 (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No:41/PHPU.D-VI/2008)</i>	Putusan Sela berupa Pemilihan ulang yang tertuang dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tidak dapat menghapus unsur tindak pidana politik
3.	Ananta Bagus Perdana	<i>Penegakan Hukum terhadap Tindak</i>	Kesulitan yang dihadapi penegak hukum untuk

		<i>Pidana Money Politics yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2014 (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta).</i>	menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku <i>money politic</i> di wilayah hukum Surakarta.
4.	Moh Mahfudhi	<i>“Money Politic (Prespektif Hukum Islam dan Positif)”</i>	Hukum positif dan hukum Islam sama-sama mengatur tentang tindak pidana <i>money politic</i>
5.	Nur Syamsudin, Brilliyani Erna Wati, dan Nur Hidayati Setyani	<i>“Pemberdayaan dan Perubahan Perilaku Politik Masyarakat terhadap Money politic dalam Pemilihan Umum di Kota Semarang”.</i>	Presepsi masyarakat terhadap <i>money politic</i> dan cara meminimalisirnya
6.	Penelitian penulis	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Money Politic (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 32/Pid.Pemilu/ 2017/PT.Btn)</i>	Sanksi pidana penjara bagi pelaku <i>money politic</i> dalam putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 32 /Pid.Pemilu/ 2017/PT.Btn) berbeda dengan putusan

		<i>/Pid.Pemilu/2017/PT. Btn)</i>	tingkat pertama dan batas minimum khusus yang terdapat dalam pasal 187A ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 tahun 2016
--	--	--------------------------------------	---

E. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen yang penting agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan mudah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research)²² yaitu dengan mengumpulkan data-data yang di peroleh dari penelitian yang dilakukan dalam kepustakaan. Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan, yakni berupa dokumen putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 32/Pid.Pemilu/2017 /PT.Btn.

²² Penelitian kepustakaan (Library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Lihat Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3

2. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum berupa putusan hakim yang dikaitkan dengan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa dokumen putusan pengadilan, yaitu putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 32/Pid.Pemilu/2017/PT.Btn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini meliputi berbagai bahan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok permasalahan. Bahan-bahan tersebut terdiri atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016, KUHP, KUHP, bahan kepustakaan berupa buku-buku seperti buku karya Indra Ismawan tentang *“Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu”*, buku karya L. Sumartini tentang *“Money Politics dalam Pemilu”*, buku karya Sintang Silaban, *“Tindak Pidana Pemilu*, jurnal karya Dedi Irawan tentang *“Studi Tentang Money politic (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan”*, buku karya Ahmad Khoirul Umam

tentang “*Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*”, buku karya Yusuf Qardhawi tentang *Halal dan Haram Dalam Islam*, buku karya Abdullah al-Mushlih ash-Shawi tentang *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, buku karya A. Djaizuli tentang *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, buku karya Wahbah al-Zuhaili tentang *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (juz VI), buku karya Amir Syarifuddin tentang “*Garis-Garis Besar Fiqh*”, buku karya Ahmad Wardi Muslich tentang “*Pengantar Dan Asas Hukum Islam*”, buku karya Amrullah Ahmad tentang “*Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional*”, dan juga didukung dengan *kitab-kitab Fiqh*, serta *literatur-literatur* lain sebagai komplementer yang sesuai dengan obyek permasalahan.

2. Analisis Data

Penelitian ini merupakan produk hukum maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif/doktrinal. Artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.²³

Adapun untuk menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 32/Pid.Pemilu/2017/PT.Btn, penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan struktur dan dictum yang terdapat dalam putusan tersebut. Setelah itu penulis akan menjabarkan *ratio decinendi* dari putusan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

²³ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan penelitian Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4-5.

Selanjutnya karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka penelitian ini berisi kata-kata *bukan angka*.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan yang saling berkaitan.

Bab I: Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Umum tentang *Money Politic*. Didalamnya membahas pengertian *money politic*, unsur-unsur *money politic*, bentuk-bentuk *money politic*, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perbuatan *money politic*, dampak perilaku *money politic*, *money politic* dalam peraturan perundang-undangan, dan *money politic* menurut hukum Islam.

Bab III: Sanksi Pidana *Money Politic* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 32/pid.pemilu/ 2017/PT.Btn. Berisi tentang posisi kasus, dakwaan dan tuntutan, dan putusan.

Bab IV: Analisis *Money Politic* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 32/pid.pemilu/2017/PT.Btn. Berisi tentang aspek tindak pidana atau *jarīmah* dan aspek hukuman atau *‘uqūbah*.

Bab V: Penutup. Berisi tentang simpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *MONEY POLITIC*

A. Pengertian *Money Politic*.

Money politic berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu *money* dan *politic*, *money* yaitu uang dan *politic* yaitu politik²⁴ dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan secara kebahasaan yaitu politik uang. Sedangkan *money politic* menurut istilah merupakan suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.²⁵

Menurut pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan,²⁶ definisi *money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Sedangkan menurut Hamdan Zoelva,²⁷ *money politic* adalah upaya mempengaruhi perilaku pemilih agar memilih calon tertentu dengan imbalan materi (uang atau barang). Demikian juga *money politic* termasuk mempengaruhi

²⁴ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 384 dan 437

²⁵ Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung: PT Mizan Publika, 2015), hlm: 155.

²⁶ Indra Ismawan, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta, Penerbit Media Presindo, 1999), hlm. 5.

²⁷ Hamdan Zoelva, *Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic*. Disampaikan pada Seminar Nasional Instrumen Hukum Pencegahan Dan Penindakan Praktik Ilegal Dalam Pemilu 2014 Hanns Seidel Foundation (Hsf) Indonesia-Pusat Studi Hukum Konstitusi (Pshk) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tanggal, 22 Februari 2014 Diakses dari http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34118878/CATATAN_TERHADAP_PENCEGAHAN_MONEY_POLITICSlibre.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1413044544&Signature=u1ddSVDSFEys7DZmSGRMfqHYGHI%3D, diakses tanggal 8 Februari 2018.

penyelenggara dengan imbalan tertentu untuk mencuri atau menggelembungkan suara, termasuk membeli suara dari peserta atau calon tertentu. Namun demikian, *money politic* berbeda dengan biaya politik dimana hal itu adalah sebuah keniscayaan karena biaya politik merupakan biaya kemenangan yang wajar dan dibenarkan oleh hukum.

Selain itu definisi dari Johny Lomulus,²⁸ juga menyatakan bahwa *money politic* merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut. Selanjutnya Gary Goodpaster,²⁹ dalam studinya mendefinisikan *money politic* sebagai bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses-proses pemilu, yang meliputi pemilihan presiden, kepala daerah, dan pemilu legislatif. Gary Goodpaster, kemudian menyimpulkan bahwa *money politic* merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan.

Berdasar penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan *money politic* adalah semua tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya memilih calon tertentu pada saat pemilihan umum ataupun tidak menjalankan haknya untuk tidak memilih.

²⁸ Johny Lomulus, *Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Langsung di Kota Bitung dalam Demokrasi Mati Suri*, Jurnal Peneitian Politik Vp. 4 No. 1 2007, LIPI, hlm. 35.

²⁹ Gary Goodpaster, *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: USAID,2001), hlm.

Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum.

Selanjutnya dari definisi tersebut dapat disimpulkan *money politic* terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Dengan sengaja, maksudnya perbuatan itu memang diketahui dan dikehendaki oleh pelakunya;
2. Menjanjikan, dianggap sudah cukup perbuatan pelaku hanya dengan perkataan saja;
3. Memberikan, berupa memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain;
4. Kepada pemilih;
5. Langsung atau tidak langsung;
6. Memilih calon tertentu tertentu; atau
7. Tidak menggunakan hak pilih.

B. Bentuk-Bentuk *Money Politic*.

Sebagaimana dikemukakan dalam salah satu unsur *money politic* adalah memberikan sesuatu, pemberian ini dalam praktiknya ada beberapa bentuk, yaitu:³⁰

1. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendorong hasil pemilu/pilkada, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis

³⁰ Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang: Rasail, 2006), hlm.24.

terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.³¹

Dalam pemilu/pilkada, uang sangat berperan penting. Modus *money politic* yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:³²

- a. Pemberian uang sebagai pengganti sarana kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui kampanye kemudia setelah selesai acara, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.
- b. Pemberian uang secara langsung, misalnya: distribusi sumbangan kepada masyarakat. Bentuk ini biasanya sangat efektif karena uang tersebut langsung diberikan kepada pemilih terutama pemilih yang ekonominya rendah.

2. Barang

Bentuk *money politic* yang kedua adalah berupa barang, biasanya barang di distribusikan oleh tim sukses kepada masyarakat terutama masyarakat golongan ekonomi rendah. Barang yang dimaksud ini bisa berupa sembako, kaos, atribut maupun *sovenir* dan yang lainnya.³³

³¹ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001), hlm.95.

³² L. Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), hlm.148-149.

³³ Mohamad Amanu, "*Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)*", (Malang: Universitas Brawijaya, 2015), hlm:

3. Berbentuk Fasilitas Umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun juga kepada masyarakat umum. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “*jariyah politis*” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan *jariyah politis*, yaitu: pembangunan masjid, mushala, madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Money Politic*

Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat terlibat dalam *money politic*, antara lain:³⁴

1. Ekonomi

Faktor ekonomi juga ikut mempengaruhi adanya *money politic* di masyarakat. Besarnya jumlah penduduk miskin Indonesia jadi sasaran empuk *money politic*, dan juga akan terjadi kepada mereka yang tidak miskin dan termasuk pemilih pemula, namun sasaran yang paling mudah dipengaruhi adalah orang miskin, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September 2017,³⁵ jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di

³⁴ Harun Al-Rasyid, “*Fikih Korupsi*” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 55-60

³⁵ Dikutip dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>, pada tanggal 8 Februari 2018

Indonesia mencapai 26,58 juta orang. jumlah penduduk miskin ini akan menjadi rebutan pada pemilu/pilkada, baik yang dilakukan oleh parpol, elit politik atau menggunakan perpanjangan tangan para tim sukses, berbagai program dilakukan mereka untuk menarik simpati masyarakat terutama orang miskin.

Sebagai contoh tindakan *money politic* adalah pembagian sembako atau memberikan uang langsung kepada pemilih baik secara cash maupun bertahap, peristiwa ini lebih banyak terjadi di pedesaan, daerah terpencil dan miskin dalam suatu wilayah tetapi tidak jarang juga terjadi di perkotaan, masyarakat yang membutuhkan uang seakan tidak menyadari apa yang telah mereka lakukan adalah perbuatan yang salah dan dapat menghancurkan Indonesia, sehingga tindakan ini terus menyuburkan praktik *money politic*.

Para kandidat atau tokoh politik menjadikan kemiskinan ini peluang untuk membuat rakyat terbuai dengan iming-iming uang. Para kandidat juga menganggap rakyat adalah seorang yang materialis, yang mudah terbuai oleh rupiah sehingga suara rakyat pun dapat dinilai dengan uang. Masyarakat yang sangat membutuhkan uang, mereka sangat ikhlas dan rela suaranya dihargai oleh pelaku *money politic*. Masyarakat dari kalangan ekonomi kurang tersebut malah menjadikan saat-saat pemilu/pilkada sebagai kesempatan emas untuk mendapatkan uang. Bagi mereka moment tersebut sangat rugi bila dilewatkan tanpa mendapatkan sepeserpun uang untuk meringankan beban hidup yang dialaminya. Oleh

karenanya, masyarakat dari golongan ekonomi lemah justru menunggu kandidat yang akan memberikan uang.

2. Persaingan

Money politic merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Keberadaannya, sering dinistakan karena dalam banyak hal melahirkan malapetaka dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, di sisi lain manusia modern mempraktikkannya atas dasar kesadaran dan keyakinan filosofinya agar dapat memenangkan persaingan.

Filosofi manusia modern sangat menjunjung tinggi rasionalitas dan lebih banyak terfokus pada materi kebendaan yang dipandang memiliki nilai. Salah satunya yang memiliki nilai tertinggi adalah uang. Dalam perspektif ekonomi, *money politic* muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat). Keduanya saling mendapatkan keuntungan dengan mekanisme *money politic*.

Salah satu alasan mengapa para kandidat melakukan *money politic* adalah mereka takut kalah bersaing dengan kandidat lain. Banyaknya kandidat yang akan maju, maka memunculkan persaingan dalam merebut kursi jabatan/menjadi penguasa semakin terbuka. Kandidat yang baru bersaing masih mencari bentuk serangan fajar.³⁶ Mereka berpotensi melakukan *money politic*.

³⁶ Serangan Fajar merupakan cara yang dilakukan menjelang pencoblosan dengan usaha mendatangi rumah-rumah calon pemilih agar memilih kandidat tertentu dalam pemilihan umum. Dikutip dari penelitian Mohamad Amanu, "*Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi*

Para kandidat yang pernah mencalonkan diri pada pemilu/pilkada sebelumnya tentu lebih ahli dalam *money politic* dan dipastikan akan mengulang hal yang sama. Masing-masing kandidat dalam kelompok-kelompoknya kemudian membuat strategi-strategi guna memenangkan persaingan tersebut. Strategi-strategi yang digunakan sangat beragam, salah satunya menempuh yang praktis dan instan untuk merebut suara dengan cara *money politic*.

Jika dilihat dari undang-undang yang berlaku, *money politic* sebenarnya adalah suatu pelanggaran pemilu/pilkada karena tidak dibenarkan “membeli” suara rakyat oleh peserta pemilu/pilkada. Namun di lain pihak baik politisi maupun konstituennya tidak memepermasalahkan hal itu karena antara politisi yang bersaing terdapat konflik kepentingan untuk merebut kursi dewan dengan suara rakyat sebanyak-banyaknya. Di lain pihak antara politis dan rakyat mempunyai peran dan fungsi masing-masing dalam suatu struktur politik berdemokrasi. Rakyat sebagai pemilik suara tentu akan dibutuhkan oleh politisi, dan akan diperoleh lebih banyak suara rakyat jika kandidat bersangkutan bisa memberikan “imbalan” berupa uang kepada rakyat.

3. Kebijakan

Kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat melahirkan ketidakpercayaan. Sehingga muncul pendapat “siapaapun yang terpilih kita tetap miskin”. Sepertinya, masyarakat traditional lelah mendengarkan janji-janji dan mulai apatis terhadap proses demokratisasi. Karena

kemudian lahir pendapat, daripada tidak mendapatkan uang sama sekali, lebih baik kita memilih kandidat yang mau memberikan uang.

4. Komunikasi

Rendahnya komunikasi calon terpilih dengan konstituen pasca-pemilu/pilkada menjadikan kampanye pada pemilu/pilkada berikutnya merupakan ajang bagi kandidat untuk meningkatkan elektabilitasnya. Dengan berbagai pendekatan yang digunakan, masyarakat tradisional menangkap hal ini sebagai “peluang bisnis”. Muncul pertanyaan “kapan lagi diambil uangnya, kalau sudah duduk malah lupa”. Akhirnya, ajang kampanye dan tentunya dengan *money politic* dari kandidat tersebut menjadi lahan baru dari masyarakat untuk bisa mendapatkan uang dari para kandidat.

5. Kedekatan Partai Politik dengan Pemilih

Marcuz Mieetzer,³⁷ menyatakan bahwa semakin rendah kedekatan masyarakat dengan parpol, maka sudah tentu mereka pun akan lebih mudah terlibat dalam permainan *money politic*. Hal ini dinilai wajar oleh masyarakat itu sendiri, namun bertolak belakang dengan nilai demokrasi yang seharusnya jujur dan adil.

6. Pengetahuan Politik yang Rendah.

Gil Troy,³⁸ menyatakan bahwa faktor rendahnya pengetahuan politik pemilih akan sangat berpengaruh dalam menentukan sikap apakah

³⁷ Marcuz Mieetzer, “Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption”, *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategig Affair*. Vol.29, Number 2, Agustus 2007, hlm. 238-263

³⁸ Gil Troy, “Moneyand Politics: The Oldest Connection”. *The Wilson Quarterly* (1976), Vol. 21, No 3 (Summer, 1997), hlm. 14-32, dikutip dari <http://www.jstor.org/stable/40260457> , pada tanggal 13 Februari 2018

mereka akan menerima *money politic* atau tidak. Jika pemilih memiliki pengetahuan bahwa suara mereka akan menentukan nasib pemerintahan dan pembangunan bangsa untuk lima tahun kedepan, maka tentunya mereka akan menolak *money politic*. Namun jika sebaliknya, para pemilih tidak faham dan mengerti bahwa suara mereka itu juga akan menentukan nasib pemerintahan dan pembangunan bangsa, maka mereka akan cenderung menerima tawaran *money politic* tersebut. *Money politic* pun tidak menjadi masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berfikir jauh kedepan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan “ditarik” kembali oleh para kandidat yang nanti terpilih menjadi anggota legislatif maupun kepala daerah. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

7. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang juga mempengaruhi keterlibatan masyarakat terhadap *money politic*. Karena semakin tinggi tingkat inteligensi seseorang, maka dia akan menjadi lebih cerdas dalam memilih pemimpin, terlepas dari *money politic*.³⁹ Namun pada kenyataannya di Indonesia tingkat pendidikan masyarakat masih minim, dan inilah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum dari parpol tertentu untuk melancarkan *money politic*. Ketika kondisi ini terus-menerus terjadi, maka harapan kita untuk mendapatkan pemilu/pilkada yang demokratis, jujur dan bersih akan sulit tercapai. Oleh karena itu, dikira perlu untuk meningkatkan taraf pendidikan di Indonesia.

³⁹ Sudirman Said dan Nizar Suhendra, “Korupsi dan Masyarakat Indonesia”, dalam Hamid Basyaib, dkk, *Kajian Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Aksara, 2002), hlm 13

8. Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Kurangnya pengawasan atau tidak berjalannya pengawasan terhadap pemilu/pilkada merupakan latar belakang yang membuat menjamurnya *money politic* di Indonesia. Hal tersebut bisa terjadi karena orang yang bertugas sebagai pengawas ikut andil juga dalam pelaksanaan *money politic* tersebut. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku dan penerima *money politic* tersebut dikarenakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum bekerja maksimal, sering juga tidak berdaya melakukan pengawasan pemilu, kemungkinan ini terjadi karena lemahnya integritas yang dimiliki oleh komponen pengawas pemilu, dalam lain hal kesulitan terjadi karena masyarakat seakan melindungi dan kurang berpartisipasi untuk melaporkan dan menolak *money politic*.

9. Kebudayaan

Adanya budaya saling memberi dan jika mendapat rezeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang tampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk *money politic* dari peserta pemilu/pilkada dianggap sebagai rezeki bagi masyarakat yang dianggap tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu/pilkada, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses bahkan ikut menyukseskan *money politic* demi memenangkan peserta pemilu/pilkada tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terima kasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap caleg yang memberi uang. Dalam hal ini kebudayaan yang sejatinya bersifat benar dan baik, telah melenceng dan disalah artikan oleh

masyarakat. Saling memberi tidak lagi dalam hal kebenaran melainkan untuk sesuatu kecurangan. Masyarakat traditional yang masih menjunjung tinggi budaya ini menjadi sasaran empuk bagi para caleg untuk melakukan *money politic* tanpa dicurigai.

D. Dampak *Money Politic*.

Money politic dalam pemilu/pilkada memiliki beberapa dampak negatif, beberapa diantaranya yaitu makin tingginya biaya politik, korupsi dan rusaknya tatanan demokrasi. Ketiga hal tersebut kemudian penulis jelaskan sebagai berikut:⁴⁰

1. Makin Tingginya Biaya Politik

Dengan adanya praktek *money politic*, maka sebuah parpol diuntut untuk lebih memeras kantong, mengingat sudah terbiasanya masyarakat dengan pemberian uang dan barang lainnya atau bisa kita katakan parpol yang lebih banyak mengeluarkan biaya akan keluar menjadi pemenang. Oleh karena itu parpol-parpol tersebut akan berusaha memberikan uang dan semisalnya kepada masyarakat melebihi parpol pesaingnya, agar masyarakat memilihnya.

2. Korupsi

Korupsi merupakan dampak terbesar dari adanya praktek politik uang, karena merupakan salah satu cara untuk mengembalikan biaya-biaya

⁴⁰ Tim Pengumpul Data KPU Kabupaten Bombana, "*Dampak Politik Uang (Money Politic) Terhadap Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih Di Kabupaten Bombana*" dikutip dari nanopdf.com_grafik-sikap-responden-jika-politik-uang-money.pdf, pada tanggal 13 Februari 2018, hlm. 8

pada saat pemilu/pilkada dan pendapatan resmi pemimpin daerah tidak memungkinkan untuk menutup biaya pilkada. Oleh karena itu bisa kita katakan korupsi dilakukan untuk mengembalikan modal yang telah di investasikan ketika melakukan kampanye.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), sebagaimana dikutip oleh tribunnews.com,⁴¹ bahwa sepanjang 2017 terdapat 30 orang [kepala daerah](#) yang terdiri dari 1 (satu) gubernur, 24 (duapuluh empat) bupati/wakil bupati dan 5 (lima) wali kota/wakil wali kota telah menjadi [tersangka](#) kasus [korupsi](#). Berdasarkan temuan utama pemantauan penanganan kasus [korupsi](#) sepanjang tahun 2017 yang ditangani oleh aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian), mereka terlibat dalam 29 [korupsi](#) dengan kerugian negara Rp 231 miliar dan nilai suap Rp 41 miliar. [Korupsi kepala daerah](#) ini terkait dengan penyalahgunaan APBD, perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi dan mutasi pejabat daerah, pengelolaan aset daerah dan lainnya.

3. Rusaknya Tatanan Demokrasi

Dalam konsep demokrasi kita kenal istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini berarti rakyat berhak menentukan pilihannya kepada calon yang di kehendaknya tanpa ada intervensi dari pihak lain. Namun dengan adanya praktek *money politic* maka semua itu seolah dalam teori belaka. Karena masyarakat terikat oleh parpol yang memberinya uang dan semisalnya. Karena sudah diberi uang masyarakat merasa berhutang budi

⁴¹ Dikutip dari <http://wartakota.tribunnews.com/2018/02/19/icw-sebut-ada-30-kepala-daerah-tersangka-korupsi-2017>, pada tanggal 25 Februari 2018

kepada parpol/kandidat yang memberinya uang tersebut, dan satu-satunya cara untuk membalas jasa tersebut adalah dengan memilih/mencoblosnya. Dengan demikian motto pemilu yang bebas, jujur, dan adil hanya sebuah kata-kata yang terpampang di tepi-tepi jalan tanpa pernah di realisasikan.

Setiawan Budi Utomo, sebagaimana dikutip Mashudi Umar,⁴² menambahkan dampak negatif *money politic*, tidak hanya rusaknya mental dan kredibilitas pejabat dan aparat sebagai penegak hukum dan penyelenggara kepentingan publik, melainkan juga turunya kepercayaan masyarakat kepada mereka secara umum, walaupun sebenarnya banyak yang berbuat baik namun masyarakat melihat yang buruk saja.

E. *Money Politic* dalam Peraturan Perundang-undangan.

Fenomena *money politic* terjadi hampir setiap pemilu, pilkada bahkan sampai pada tingkat pemilihan kepala desa, namun dalam hal ini penulis membatasi hanya dalam pilkada karena objek kajian penelitian ini adalah putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 32/Pid.Pemilu/2017/PT.Btn. Selanjutnya *money politic* merupakan tindak pidana jenis pelanggaran terhadap undang-undang, dan tindak pidananya merupakan delik aduan. Karena *money politic* adalah delik aduan maka pelanggaran tersebut hanya bisa ditindak lanjuti apabila ada pihak yang dirugikan.

⁴² Mashudi Umar, *Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)*, Jurnal At-Turas, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 115-116

Berdasarkan asas hukum *lex specialis de raget lex generalis*, artinya bahwa peraturan khusus dapat mengenyampingkan peraturan umum,⁴³ maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diundangkan sejak tanggal 1 juni 2016 akan diterapkan dalam pilkada bukan KUHP.

Kemudian apabila undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya sejalan dengan asas hukum *lex posteriori derogat lex priori* yang artinya undang-undang yang datangnya kemudian boleh menyimpang dari undang-undang yang dahulu. Dari keterangan diatas kita dapat mengetahui bahwa perlu adanya hukuman yang lebih berat bagi pelanggar tindak pidana.

Berdasar penjelasan dibab-bab terdahulu, praktik *money politic* ini jelas dinyatakan *illegal*, tetapi dalam kenyataanya modus operandi *money politic* tetaplah menjamur. Berbagai instrumen hukum yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku namun sampai kini belum efektif. Seperti diketahui dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, secara tegas mengatur larangan melakukan *money politic* terutama pada pasal 73 yang berbunyi:

- (1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjajikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

⁴³ Sintang Silaban, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hlm. 57.

- (3) Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
- a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana pada pasal 187A, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (4) dipidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh

puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”).

- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

F. *Money Politic* dalam Hukum Islam.

Sebelum menanggapi fenomena *money politic* yang terjadi hampir ada setiap pemilu/pilkada dari sudut pandang fiqh, terlebih dulu penulis membatasi pembahasan ini pada pengertian bahwa *money politic* yang dimaksud adalah memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya. Secara umum *money politic* tersebut dapat digolongkan sebagai suap karena memiliki kesamaan dengan unsur-unsur suap yang berupa: pertama, pemberi suap yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang untuk mencapai tujuan, kedua, penerima suap, yaitu: orang yang menerima suatu dari orang lain baik berupa harta atau uang supaya melaksanakan permintaan penyuap, ketiga, suapan, yaitu harta atau uang yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.⁴⁴

⁴⁴ Abdullah Bin Ab. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, trjmh. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, (Jakarta : Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 11

Selanjutnya kata suap dalam bahasa Arab disebut "*risywah*" atau "*risyā*" secara bahasa berarti "memasang tali, ngomong, mengambil hati".⁴⁵ Dalam *Lisānul 'Arāb* karya Ibnu Mandzur,⁴⁶ disebutkan perkataan Abul 'Abbas

الرَّشْوَةُ مأخوذة من رشا الفرخ إذا مدَّ رأسه إلى أمه لتزقّه

“Kata Rusywah/Risywah diambil dari konteks anak burung/ayam yang menjulurkan kepalanya pada mulut induknya seraya meminta agar makanan yang berada di paruh induknya di suapkan untuknya’.

Selanjutnya menurut istilah sebagaimana dikutip dari Ibrahim Musthafa,⁴⁷ dalam kitabnya *al-Mu‘jam al-Wāsiṭ* juga disebutkan bahwa makna *risywah* adalah:

ما يعطى لقضاء مصلحة أو ما يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق

“Apa-apa yang diberikan (baik uang maupun hadiah) untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatalkan suatu yang haq”

Selain itu Ibnu Hajar al ‘Asqalani,⁴⁸ di dalam kitabnya *Fathul al-Bāri* menukil perkataan Ibnu al ‘Arabi ketika menjelaskan tentang makna *risywah*.

الرَّشْوَةُ كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عوناً على ما لا يحل

“*Risywah* atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/ kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/ melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.”

⁴⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta : Handika Agung, 1989), hlm. 142

⁴⁶ Ibnu Mandzur, *Lisanul 'Arab*, (Beirut: Dar al Shodir, tt), Cetakan I, Juz 14, hlm. 322.

⁴⁷ Ibrohim Musthofa, Ahmad az Zabab dkk, *al Mu'jam al Wasith* (Majma' Lughoh 'Arobiyyah, [Daru al Dakwah](#), Juz 1, hlm. 148.

⁴⁸ Ibnu Hajar al A'sqolani, *Fathul Bari* (Tahqiq Ibnu Baz dan Muhibbuddin al-Khotib), dar Al-Fikr, Beirut, Juz 5 hlm.221.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI),⁴⁹ suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Menurut Ali bin Muhammad as-Sayyid as-Syarif al-Jurjani,⁵⁰ *risywah* adalah sesuatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang benar atau membenarkan yang batil.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, sesuatu dinamakan *risywah* jika mengandung unsur pemberian, ada niat untuk menarik simpati orang lain, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar, merealisasikan kebathilan, mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan, mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya dan memenangkan perkaranya.

Apabila dilihat dari segi esensi *risywah* merupakan pemberian atau ‘*aṭiyyah*. Dalam hukum Islam ada beberapa istilah yang memiliki keserupaan “*risywah* dengan ‘*aṭiyyah*” diantaranya adalah:⁵¹

1. Hadiah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan. Perbedaannya dengan *risywah* adalah jika *risywah* diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan hadiah diberikan dengan tulus sebagai penghargaan dan rasa kasih sayang.

⁴⁹ Depag RI, *Himpunan Fatwa MUI, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal*, Jakarta, 2003, hlm.274

⁵⁰ Menurut Ali bin Muhammad as-Sayyid as-Syarif al-Jurjani dalam bukunya Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Intermasa, 1996), hlm. 1506

⁵¹ A. Djaizuli, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (cet. ke-2) (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 349.

2. Hibah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang dengan tanpa mengharapkan imbalan dan tujuan tertentu. Perbedaannya dengan *risywah* adalah bahwa “*ar-rāsyī*” yaitu pemberian suap, memberikan sesuatu karena ada tujuan dan kepentingan tertentu, sedangkan “*al-wāhib*” atau pemberi hibah memberikan sesuatu tanpa tujuan dan kepentingan tertentu.
3. Shadaqah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT. Seperti halnya zakat, ataupun infaq. Perbedaannya dengan *risywah* adalah bahwa seseorang yang bersedekah, ia memberikan sesuatu hanya karena mengharapkan pahala dan keridhaan Allah semata tanpa unsur keduniawian yang dia harapkan dari pemberian tersebut, sedangkan *risywah* ada unsur kepentingan dan tujuan dibalik pemberian itu.

Selanjutnya, secara umum *risywah* dapat diklasifikasikan menurut niat pemberi *risywah*. Menurut niatnya, *risywah* terbagi tiga macam, yaitu: *Pertama*, *risywah* untuk membatalkan yang *haq* atau membenarkan yang *batil*. *Risywah* yang digunakan untuk membatalkan yang *haq* atau membenarkan yang *batil* adalah suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain dan dosa. Karena *haq* itu kekal dan *batil* itu sirna.⁵²

Kedua, *risywah* untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kezaliman. Banyak alasan mengapa seseorang harus melakukan *risywah*, salah satunya adalah untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kebatilan serta kezaliman. Kalau terpaksa harus melalui jalan menyuap untuk maksud di atas, dosanya adalah untuk yang menerima suap. *Ketiga*, *risywah*

⁵²Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama), Jurnal At-Turas, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 119

untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan. Jabatan atau pekerjaan yang seharusnya diperoleh berdasarkan atas keahlian diri, akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa orang yang mendapatkannya dengan cara-cara yang salah.⁵³

Berdasar klasifikasi diatas *money politic* termasuk jenis ketiga, karena pelaku *money politic* melakukan segala perbuatannya seperti memberikan sejumlah uang atau barang untuk dapat menarik simpati pemilih supaya mendapatkan jabatan yang diinginkan seperti kepala daerah.

Adapun landasan hukum diharamkannya *risywah* terdapat dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Al-Baqarah ayat 188).⁵⁴

Selain itu Allah berfirman dalam surat al-Ma'idah ayat 42 yang berbunyi:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلْسُّخْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ ۖ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art (J-ART)), hlm. 29

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (seperti uang sogokan dan sebagainya). jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”(Al-Ma’idah ayat 42).⁵⁵

Selanjutnya Rasulullah SAW juga bersabda dalam suatu hadits:

عن عبد الله بن عمر وقال: لعن رسول الله ﷺ الراشي و المرتشي (رواه الترمذي)

“Dari Abu Hurairah r.a. dia telah berkata: “Rasulullah SAW telah mengutuk orang yang suka memberi suap dan orang yang suka menerima suap”(HR. Tirmizi), Hadits ini menurut syaikh al-Albani dinyatakan *ṣaḥīḥ*.⁵⁶

Perbuatan *risywah* ini adalah perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Mereka yang terjebak dalam budaya *risywah* akan memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Rasulullah SAW. bersabda, “Pemberi dan penerima suap (*risywah*) kedua-duanya akan masuk neraka”. Dalam sebuah hadits ditegaskan bahwa Rasulullah SAW melaknat bagi penyuap dan yang menerima suap. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim, Rasulullah SAW bersabda:

وعن ثوبان قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي و المرتشي والرائش "يعني: الذي يمشي بينهما (رواه أحمد والحكم)

⁵⁵ *Ibid*, hlm.115

⁵⁶ Sulayman Ibn al-Ash’ath al-Sajastaniy Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (juz II, No. 3580) (Beirut: Dar al Fikr, 2007), hlm. 324.

“Dari Tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya” (HR. Ahmad dan Hakim).⁵⁷

Dengan demikian, jika dicermati lebih jauh ternyata hadist-hadist Rasulullah itu bukan hanya mengharamkan seseorang memakan harta hasil dari suap-menyuap, tetapi juga diharamkan melakukan hal-hal yang bisa membuat suap-menyuap itu berjalan. Diharamkan itu bukan hanya satu pekerjaan yaitu memakan harta suap-menyuap, melainkan tiga pekerjaan sekaligus, yaitu penerima suap, pemberi suap, dan mediator suap-menyuap. Sebab tidak akan mungkin terjadi seseorang memakan harta hasil dari orang suap-menyuap, kalau tidak ada yang menyuapnya. Orang yang melakukan suap-menyuap pun termasuk mendapat laknat dari Allah juga. Sebab karena pekerjaan dan inisiatif dialah maka ada orang yang makan harta suap-menyuap. Dan biasanya dalam kasus suap-menyuap seperti itu, ada pihak yang menjadi mediator atau perantara yang bisa memuluskan jalan.

Secara sederhana, hukum politik uang atau *money politic* dalam Islam sama dengan suap, dimana yang melakukan dan menerima sama-sama mendapat dosa dan kutukan atau laknat. Dalam pemilu maupun pilkada, hak pilih manusia, adalah hak individu yang dilindungi baik secara hukum syariat dan undang-undang suatu negara, sehingga betapa berharganya sebuah keputusan dalam menentukan pilihan tersebut. Akan tetapi dengan datangnya *money politic* sebagai suatu bentuk suap gaya baru, manusia sudah tercabut dari makna hakikinya dalam melakukan pilihan.

⁵⁷ Muhammad bin Ismail Kahlani Ash-Sau'ani, *Subul as-Salam* (Bandung: Dahlan,tt), hlm. 43.

Selain itu Lembaga *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama (selanjutnya disingkat menjadi LBM NU) juga mengungkapkan bahwa *money politic* itu hukumnya haram, dengan alasan karena praktik tersebut melanggar hukum Agama dan Negara. Agar sanksi hukum tersebut terasa mengena diperlukan formula hukum yang tepat sasaran. NU sebagai organisasi keagamaan telah mengeluarkan keputusan *istinbat al-Ahkam* tentang *money politic*. Ini sebagai bentuk tanggung jawab dan peran ulama sebagai pemuka agama dalam memecahkan persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵⁸

Berdasar beberapa penjelasan diatas diungkapkan bahwa *risywah* adalah perbuatan jahat yang dilarang oleh *syara'* dan pelakunya diancam. Ancaman yang ada dalam *nās- nās* tersebut adalah ancaman siksa neraka di akhirat. Sedangkan ancaman di dunia tidak disebutkan dalam *nās- nās* itu. Sedangkan untuk ancaman di dunia para ulama mengelompokkan *jināyah* dengan melihat kepada sanksi hukuman sebagai berikut:⁵⁹

1. *Qiṣās-Diyāt*, yaitu tindak kejahatan yang sanksi hukumannya adalah balasan setimpal (*qiṣās*) dan denda darah (*diyāt*). Contohnya pembunuhan dan penghilangan anggota tubuh.
2. *Hudūd*, yaitu kejahatan yang sanksi hukumannya ditetapkan sendiri secara pasti oleh Allah dan/atau Rasul. Contohnya pencurian, perampokan, perzinaan dll.

⁵⁸ Lembaga *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama (selanjutnya disingkat menjadi LBM NU) sebagaimana dikutip dalam *Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)*, *Jurnal At-Turas*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 107

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 256-257.

3. *Ta'zīr*, yaitu kejahatan lain yang tidak diancam dengan *qiṣās-diyāt* dan tidak pula dengan *hudūd*. Dalam hal ini ancamannya ditetapkan oleh imam atau penguasa.

Berkaitan dengan sanksi bagi pelaku *risywah* dalam hal ini, Abdul Muhsin al-Thariqi,⁶⁰ mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tidak pidana *money politic* atau *risywah* (suap-menyuap) tidak disebutkan secara jelas oleh syari'at (al-Qur'an), oleh karena itu sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam katagori sanksi-sanksi *ta'zīr* yang kompetensinya ada ditangan hakim.

Adapun definisi *ta'zīr* menurut bahasa, lafadz *ta'zīr* berasal dari kata *'azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). *Ta'zīr* bisa berarti *addaba* (mendidik).⁶¹ Sedangkan menurut istilah Abdul Qadir Audah,⁶² *ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zīr* diartikan sebagai mendidik karena *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku agar menyadari perbuatan *jarīmahnya* kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Ada istilah lain sebagaimana yang telah diungkapkan al-Mawardi bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.⁶³

⁶⁰ Abdul Muhsin al-Thariqi dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 9.

⁶¹ Ibrahim Unais, *al-Mu'jam al-Wasīth*, (Mesir : Dar at-Turas al-Arabi, t.t), hlm. 598.

⁶² Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islamī*, (Kairo: Maktabah Arabah, 1963), hlm. 81.

⁶³ Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sultaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 236.

Dari berbagai definisi diatas dapat diambil pengertian bahwa *ta'zīr* adalah suatu *jarīmah* yang hukumannya di serahkan kepada hakim atau penguasa hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah ta'zīr* dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak ada yang menyebutkan secara terperinci, baik dari segi bentuk maupun hukumnya.⁶⁴ Namun menurut Sharbini al-Khatib,⁶⁵ ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya jarimah *ta'zīr* adalah:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٨) لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ
بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٩)

*Sesungguhnya Kami mengutus kamu (Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang (Qs. Al-Fath:8-9).*⁶⁶

Dari ayat di atas sebagian ulama' menterjemahkan *watu'azziruhu* sebagai upaya peneguhan agama yang tentunya untuk mencapai ridha Allah SWT. Agama biasanya dipahami semata-mata membicarakan urusan spiritual, karenanya ada ketegangan antara agama dan hukum. Hukum untuk memenuhi kebutuhan sosial dan karenanya mengabdikan kepada masyarakat

⁶⁴Jaih Mubarak, *Kaidah-kaidah Fiqh Jināyah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 47.

⁶⁵Syarbini al-Khatib, *Mughny al-Muhtaj* (Mesir: Dar al-Bab al-Halaby wa Awladuhu, 1958), hlm. 191.

⁶⁶Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art (J-ART)), hlm. 511

untuk mengontrolnya dan tidak membiarkannya menyimpang dari kaedahnya, yaitu norma-norma yang ditentukan oleh agama.⁶⁷

Adapun pembagian *jarīmah ta'zīr* menurut Abdul Qadir Awdah,⁶⁸ ada tiga macam:⁴²

1. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari jarimah-jarimah *hudūd* atau *qiṣās*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
2. *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam *nās syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan
3. *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Berdasar pembagian *jarīmah ta'zīr* diatas dapat dikemukakan *money politic* termasuk jenis ketiga yaitu *jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara*, dan hukuman dari *jarīmah* tersebut diserahkan kepada *ulil 'amri* untuk menetapkan.

Hukuman *ta'zīr* beragam jenisnya dari yang seberat-beratnya sampai seringan-ringannya, menurut Ahmad Wardi Muslich secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁷Muhammad Muslehuddin, penerj. Yudian Wahyudi Amin, *Filsaafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997), hlm. 70.

⁶⁸Abdul Qadir Awdah, *al-Tashri' al-Jina'i al-Islami* (Kairo: Maktabah Arabah, 1963), hlm.15.

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya hukuman *ta'zīr* dalam hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik. Sehingga dalam hukuman *ta'zīr* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Tetapi sebagian besar *fuqoha* memberikan pengecualian terhadap peraturan hukuman tersebut yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaknya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah), atau residivis yang berbahaya. Oleh karena itu, hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan hukuman *ta'zīr* hukuman tersebut tidak boleh diperluas dan diserahkan seluruhnya kepada hakim.

2. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman *hudūd* dan hukuman *ta'zīr*. Dikalangan *fuqoha'* terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman *jilid* dalam *ta'zīr*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zīr* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah.

3. Hukuman Kawalan (Penjara atau Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman yaitu hukuman

⁶⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 255

kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas. Pertama, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi ulama berbeda pendapat. Ulama Syafiiyyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarīmah* zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarimah-jarimah yang berbahaya.

4. Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam jarimah gangguan keamanan (*hirābah*), dan para fuqoha mengatakan bahwa hukuman salib dapat menjadi hukuman *ta'zīr*. Akan tetapi untuk *jarīmah ta'zīr* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqoha tidak lebih dari tiga hari.

5. Hukuman Pengucilan

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zīr* yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah

melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Kaab bin Malik, Mirarah bin Rubaiah dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara. Sehingga turunlah firman Allah surat at-Taubah: 118, sebagai berikut:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (التوبة: ١١٨)

Artinya: “Dan terhadap tiga orang yang ditanggihkan (penerima taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang” (Q.S. At-Taubah: 118).⁷⁰

6. Hukuman Ancaman, Teguran, dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zīr*, dengan syarat dapat membawa hasil dan bukan hanya ancaman saja. Misalnya dengan ancaman cambuk, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakanya lagi. Sementara hukuman teguran bisa dilakukan apabila dipandang hukuman tersebut bisa memperbaiki dan mendidik pelaku. Hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki-maki orang lain dengan menghinakan ibunya. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam

⁷⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art (J-ART)), hlm. 206

syariat Islam dengan jalan memberikan nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al-Quran sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat *nusyuz*.

7. Hukuman Denda

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syariat Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang. Sebagian *fuqoha* berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman *ta'zīr* yang umum, tapi sebagian lainnya tidak sependapat.

Selanjutnya untuk hukuman terhadap pelaku *money politic* atau *risywah* (suap-menyuap) bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya, mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Hal ini karena tidak ada *nās qath'i* yang berkaitan dengan tindak pidana ini. Sanksi material (*al-ta'zīr bi al-māl*) merupakan bentuk hukuman material, yaitu dengan cara menyita harta yang dijadikan pelicin atau suap kemudian dimasukkan kedalam kas negara. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan sanksi ini. Namun terlepas dari pro dan kontra sanksi ini cukup efektif untuk membuat pelakunya jera.⁷¹

⁷¹ Ahmad Amrullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional*. (Jakarta: Gema Insan Press, 1999), hlm. 158.

BAB III

SANKSI PIDANA *MONEY POLITIC* DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN NOMOR: 32/PID.PEMILU/2017/PT.BTN

A. Posisi Kasus

Posisi kasus merupakan urutan peristiwa yang terkait dengan perkara.⁷² Dengan adanya posisi kasus dalam putusan hakim dan pihak berwajib akan lebih mudah untuk mengungkap suatu kejadian yang terjadi sekalipun dimasa lampau. Posisi kasus banyak dimanfaatkan untuk menguak suatu kasus seperti kasus *money politic* yang penulis tulis. Adapun posisi kasusnya bermula sekitar bulan Januari 2017, terdakwa yaitu Hidayat Wijaya Dipura bersama-sama dengan Ahyani dan Afrizal Nur CH berangkat ke kantor UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan Ciruas untuk bertemu H. Rahmat. Pada saat itu terdakwa memperkenalkan organisasi yang bernama Komunitas Warga Ciruas (KWACI) kepada H. Rahmat. Terdakwa menyampaikan kepada H. Rahmat bahwa Komunitas Warga Ciruas yang kebetulan dipimpin oleh terdakwa mengusung pasangan calon (paslon) Gubernur Banten nomor urut 1 (satu) atas nama paslon Wahidin Halim–Andika Hazrumy. Kemudian H. Rahmat pun menanggapi dan menyampaikan kepada terdakwa dengan meminta bantuan untuk memperoleh suara di wilayah Ciruas, dan pada saat itu terdakwa bersedia dan menyanggupinya.

⁷² Dikutip dari <https://kamushukum.web.id/arti-kata/kasusposisi/> pada tanggal 17 Februari 2018.

Satu bulan kemudian tepatnya pada hari senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib datang tim H. Rahmat menemui terdakwa. Tepatnya di Perumahan Taman Ciruas Permai, Blok M.1 No. 34, RT/RW: 005/004, Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Pertemuan tersebut bertujuan memberikan bingkisan kepada terdakwa supaya dibagi-bagikan kepada warga. Bingkisan tersebut berupa 10 (sepuluh) kantong plastik hitam berukuran besar dimana pada setiap kantong plastik besar berisi 25 (dua puluh lima) plastik hitam berukuran kecil dan pada setiap plastik berukuran kecil tersebut berisi 5 (lima) bungkus mie instan merek supermi dengan total jumlah keseluruhan supermi tersebut adalah sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) bungkus disertai dengan flyer bergambar pasangan calon (paslon) Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten nomor urut 1 (satu) atas nama paslon Wahidin Halim–Andika Hazrumy.

Adapun tujuan dari H. Rahmat menyuruh terdakwa membagikan bingkisan tersebut kepada warga supaya pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017 mencoblos atau memilih pasangan calon (paslon) Gubernur Banten dan wakil Gubernur Banten nomor urut 1 (satu) atas nama paslon Wahidin Halim–Andika Hazrumy. Selanjutnya bingkisan yang berupa 10 (sepuluh) kantong plastik hitam berukuran besar berisi Supermi dan flyer paslon nomor urut 1 (satu) tersebut disimpan terdakwa dirumahnya.

Selanjutnya bertempat dipinggir jalan di lingkungan perumahan Bumi Ciruas Permai Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Pukul 12.00 WIB hari senin tanggal 13 februari 2017 terdakwa bertemu dan

berbincang-bincang dengan Afrizal Nur CH Adapun topik pembahasannya membahas masalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017. Pada saat itu juga terdakwa meminta bantuan kepada Afrizal Nur CH untuk membagikan bingkisan yang ada di rumah terdakwa dan Afrizal Nur CH menyanggupi permohonan tersebut.

Malam harinya sekitar pukul 21.00 Wib Afrizal Nur CH bersama temannya Parjo dengan menggunakan mobil pick up terbuka langsung berangkat menuju rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, Afrizal Nur CH, Parjo dan terdakwa langsung mengangkut paket sembako berupa 10 (sepuluh) kantong plastik hitam berukuran besar berisi Supermi dan flyer paslon nomor urut 1 (satu) kedalam mobil pick up yang dibawa oleh Afrizal Nur CH, dan langsung membawa bingkisan tersebut kerumahnya.

Keesokan harinya bertepatan hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 18.30 WIB saudara Afrizal Nur CH pergi ke rumah Sarmedi yang merupakan ketua RT.11 di Perumahan Bumi Ciruas Permai. Namun pada saat itu Afrizal Nur CH tidak bertemu dengan Sarmedi tapi hanya bertemu dengan anaknya. Selanjutnya Afrizal Nur CH menitipkan pesan kepada anaknya untuk memberitahu Sarmedi pergi ke rumah Afrizal Nur CH untuk mengambil bungkusan. Akan tetapi setelah pesan tersebut disampaikan oleh anaknya, Sarmedi menanggapi dengan rasa takut dan tidak mau pergi kerumah Afrizal Nur CH untuk mengambil bingkisan. Hal tersebut disebabkan karena Sarmedi mengetahui kalau bingkisan atau paket tersebut kemungkinan bersumber dari tim sukses pasangan calon (paslon) Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten nomor urut 1 (satu) atas nama paslon

Wahidin Halim–Andika Hazrummy. Dan menurut sepengetahuan Sarmedi bahwa Afrizal Nur CH merupakan salah satu pendukung fanatik dari Pasangan Calon Gubernur Provinsi Banten Nomor urut 1 (satu) tersebut.

Tidak selang beberapa lama sekitar pukul 19.30 Wib Afrizal Nur CH datang kembali kerumah Sarmedi. Afrizal Nur CH datang sembari membawa paket sembako berupa 2 (dua) kantong plastik hitam berukuran besar, dimana pada setiap kantong plastik besar berisi 25 (dua puluh lima) plastik hitam berukuran kecil dan pada setiap plastik berukuran kecil tersebut berisi 5 (lima) bungkus mie instant merek Supermi dengan total jumlah keseluruhan Supermi tersebut sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) bungkus disertai dengan flyer bergambar pasangan calon (paslon) Gubernur Banten dan wakil Gubernur Banten nomor urut 1 (satu) atas nama paslon Wahidin Halim–Andika Hazrummy.

Sesampainya dirumah Sarmedi, Afrizal Nur CH meletakkan bingkisan tersebut diteras depan rumah Sarmedi. Setelah itu saudara Afrizal Nur CH masuk kedalam rumah Sarmedi, dan berbincang-bincang dengannya. Adapun inti pembahasannya dimana Afrizal Nur CH meminta tolong untuk membantu membagikan bingkisan yang telah dibawa dan diletakan di depan rumah oleh Afrizal Nur CH. Namun Sarmedi tetap menolak dengan alasan takut. Setelah itu saudara Afrizal Nur CH langsung pergi meninggalkan rumah Sarmedi dengan meninggalkan bingkisan tersebut di teras rumah Sarmedi.

Selanjutnya tidak beberapa lama 2 (dua) kantong plastik hitam berukuran besar yang berada diteras depan rumah Sarmedi tersebut diambil

semuanya oleh anak-anak yang berusia 4 (empat) – 5 (lima) tahun. Anak-anak tersebut kebetulan sedang main-main didekat rumah Sarmedi, dan kemudian dibawa kerumahnya masing-masing. Orang tua dari anak-anak tersebut diantaranya juga merupakan pemilih atau mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2017.

B. Dakwaan dan Tuntutan

1. Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan diajukan ke pengadilan, dengan adanya surat dakwaan tersebut berarti ruang lingkup pemeriksaan telah dibatasi dan jika dalam pemeriksaan terjadi penyimpangan dari surat dakwaan, maka hakim ketua sidang mempunyai wewenang untuk memberikan teguran kepada jaksa atau penasihat hukum tersangka.⁷³

Dalam proses peradilan dakwaan sangat penting seperti halnya dalam kasus *money politic* yang dilakukan oleh terdakwa Hidayat Wijaya Dipura. Dalam kasus tersebut jaksa penuntut umum membuat dakwaan berupa dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya. Jadi dakwaan

⁷³ Kuswindiarti, “Pola Pembelaan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap terdakwa dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan” JURNAL MANAJERIAL. Vol. 5, 2009, hlm.2

secara alternatif bukan kejahatan perbarengan. Dakwaan dibuat secara alternatif, dalam dua hal menurut Van Bemmelen,⁷⁴ yaitu :

- a. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti dipersidangan.
- b. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

Adapun dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Hidayat Wijaya Dipura dengan nomor register Perkara: PDM-01/SRG/03/2017 tanggal 2 Maret 2017, yang diajukan ke persidangan, sebagai berikut:

Dakwaan pertama, terdakwa Hidayat Wijaya Dipura didakwa melanggar pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, yang berbunyi:

“Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- d. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- e. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan

⁷⁴ Van Bemmelen dikutip dalam bukunya Andi Hamzah, *Pengantar Hukum acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.185

- f. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.”

Pelanggaran atas larangan tersebut diancam pidana dalam pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (4) dipidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Selanjutnya pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berbunyi:

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Dakwaan kedua, terdakwa Hidayat Wijaya Dipura didakwa melanggar pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, yang berbunyi:

“Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjajikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.”

Pelanggaran atas perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam pidana dalam pasal 187 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, yang berbunyi:

“Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

2. Tuntutan

Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (KUHAP) dengan permintaan supaya diperiksa dan diutus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Dari dua dakwaan yang disampaikan, hanya dakwaan pertama yang dijadikan jaksa penuntut umum sebagai dasar tuntutan. Hal tersebut disebabkan karena unsur-unsur dalam pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi sesuai sesuai dengan pemeriksaan bukti-bukti, saksi-saksi, dan keterangan terdakwa.

Dengan demikian terdakwa merupakan orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

sengaja dengan memberikan bingkisan sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu.

Adapun tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa Hidayat Wijaya Dipura, adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hidayat Wijaya Dipura bersalah telah melakukan tindak pidana pemilihan, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hidayat Wijaya Dipura dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sub 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dengan no. simcard XL 0877726754343 IMEI 863091029637480 MEID 9900566075666 SN 585020306964, dikembalikan kepada saksi Afrizal Nur CH;
 - b. 8 (delapan) kantong plastik besar warna hitam dan setiap 1 (satu) kantong besar berisi 25 (dua puluh lima) bungkus kantong plastik kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus mie instant

merk Supermi dan 1 lembar flyer bergambar pasangan calon No. 1 atas nama pasangan calon Wahidin Halim-Andika Hazrummy;

- c. 1 (satu) bungkus kantong plastik kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus mie instant merk Supermi dan 1 lembar flyer bergambar pasangan calon No. 1 atas nama pasangan calon Wahidin Halim-Andika Hazrummy;

Dirampas untuk negara:

- d. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J5 Prime warna hitam IMEI 353421085707967;
- e. 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 185920051212

Dikembalikan kepada terdakwa Hidayat Wijaya Dipura;

- 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

C. Putusan

Putusan merupakan aspek penting dalam penyelesaian perkara pidana. Pada prinsipnya hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila terdapat alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti tersebut.⁷⁵

Hidayat Wijaya Dipura yang dihadapkan ke pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana *money politic* oleh majelis hakim

⁷⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana – Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Cetakan Pertama, (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.112.

Pengadilan Tinggi Banten dinyatakan bersalah karena telah terbukti melanggar pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pelanggaran atas pasal tersebut diancam dengan hukuman yang diatur dalam pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten seperti halnya majelis hakim Pengadilan Negeri Serang semua unsur yang terdapat di dalam pasal pasal yang didakwakan telah terpenuhi, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁶

Pertama, unsur setiap orang, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan masyarakat pemilih, pelaksana survei/hitungan cepat, dan umum yang disebut sebagai setiap orang.⁷⁷

Menurut Moeljatno,⁷⁸ pada dasarnya setiap orang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun ada juga yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu apabila terpenuhi dua syarat, syarat psikiatris dan syarat psikologis. Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada

⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Serang No: 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/ PN.Srg, hlm. 26-33

⁷⁷ Dikutipdari <http://www.negarahukum.com/hukum/tindak-pidana-pemilu.html>, tanggal 20 Februari 2018

⁷⁸ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta:Rineka Cipta, 1993),hlm. 51

sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.

- b. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman

Berdasarkan penjelasan pada sub bab A terdakwa tidak memiliki gangguan psikiatris dan psikologis. Selanjutnya menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Serang terdakwa terbukti cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.⁷⁹

Kedua, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut Moeljatno arti dari kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP Indonesia, lain halnya dengan Swiss di mana dalam Pasal 18 KUHP Swiss dengan tegas memberikan pengertian tentang kesengajaan yaitu, “barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”.⁸⁰ Selanjutnya menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Serang kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui.⁸¹

Berdasarkan posisi kasus yang telah dijelaskan dalam sub bab A terdakwa pada tanggal 13 februari 2017 sengaja meminta bantuan kepada Afrizal Nur CH untuk membagikan bingkisan yang ada di rumah terdakwa

⁷⁹ Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN.Srg, hlm: 27

⁸⁰ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta:Rineka Cipta, 1993),hlm. 171

⁸¹ Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN.Srg, hlm: 31

kepada warga. Perbuatan tersebut dilarang sebagaimana tercantum dalam pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, yang berbunyi:

Selain Calon atau pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- 1) Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- 2) Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- 3) Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Dengan demikian, menurut majelis hakim terdakwa telah memenuhi unsur yang kedua.

Ketiga, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Dikutip dari Johny Lomulus,⁸² menyatakan bahwa *money politic* atau politik uang merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang atau barang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau

⁸² Johny Lomulus, *Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Langsung di Kota Bitung dalam Demokrasi Mati Suri*, Jurnal Penelitian Politik Vp. 4 No. 1 2007, LIPI, hlm. 35.

masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam sub bab A terdakwa melakukan perbuatan/tindakan membagikan bingkisan kepada warga. Berupa membagikan 10 (sepuluh) kantong plastik hitam berukuran besar dimana pada setiap kantong plastik besar berisi 25 (dua puluh lima) plastik hitam berukuran kecil dan pada setiap plastik berukuran kecil tersebut berisi 5 (lima) bungkus mie instan merek Supermi dengan total jumlah keseluruhan Supermi tersebut adalah sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) bungkus disertai dengan flyer bergambar pasangan calon (paslon) Gubernur Banten dan wakil Gubernur Banten nomor urut 1 (satu) atas nama paslon Wahidin Halim–Andika Hazrumy.

Namun dalam pelaksanaannya, terdakwa menyuruh Afrizal Nur CH untuk membagikan bingkisan tersebut. Akan tetapi Afrizal Nur CH hanya membagikan bingkisan sejumlah 2 (dua) kantong plastik hitam berukuran besar yang diletakan di depan rumah Sarmedi selaku ketua RT 11 di Perumahan Bumi Ciruas Permai. Dan 8 (delapan) kantong plastik hitam lainnya masih disimpan di rumah Afrizal Nur CH.

Dapat disimpulkan menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Serang terdakwa memenuhi unsur ketiga yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia. Namun dalam hal ini terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara tidak langsung yaitu dibantu temannya Afrizal Nur CH.

Keempat, untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu. Menurut Hamdan Zoelva,⁸³ *money politic* merupakan upaya mempengaruhi perilaku pemilih agar memilih calon tertentu dengan imbalan materi (uang atau barang). Tujuan terdakwa menyuruh Afrizal Nur CH untuk membagikan bingkisan. Dengan harapan supaya Afrizal Nur CH dapat mempengaruhi pemilih yang ada di Perumahan Bumi Ciruas Permai supaya pada saat pemilihan Gubernur Banten, warga memilih pasangan calon nomor 1 atas nama paslon Wahidin Halim–Andika Hazrumy.

Dengan demikian menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Serang terdakwa memenuhi unsur keempat. Walaupun dalam pelaksanaannya terdakwa tidak langsung mempengaruhi warga, namun melalui perantara, tujuan awal yaitu mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu jadi terpenuhi.

Kelima, yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan. Menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan dengan tegas bahwa seorang juga dapat dipidana karena yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam hal ini terdakwa sebagai orang yang menyuruh lakukan. Sebagaimana terdakwa menyuruh Afrizal Nur CH untuk membagikan bingkisan berupa 10 (sepuluh) kantong plastik besar. Bingkisan tersebut diperoleh terdakwa dari H.Rahmat selaku tim

⁸³ Hamdan Zoelva, *Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic*. Disampaikan pada Seminar Nasional Instrumen Hukum Pencegahan Dan Penindakan Praktik Ilegal Dalam Pemilu 2014 Hanns Seidel Foundation (Hsf) Indonesia-Pusat Studi Hukum Konstitusi (Pshk) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tanggal, 22 Februari 2014 Diakses dari http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34118878/CATATAN_TERHADAP_PENCEGAHAN_MONEY_POLITICSlibre.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1413044544&Signature=u1ddSVDSFEys7DZmSGRMfq_HYGHl%3D, diakses tanggal 8 Februari 2018.

sukses dari pasangan calon (paslon) Gubernur Banten dan wakil Gubernur Banten nomor urut 1 (satu) atas nama paslon Wahidin Halim-Andika Hazrumy. Dengan demikian menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Serang terdakwa memenuhi unsur kelima.

Melihat dari unsur-unsur diatas perbuatan terdakwa mampu dipertanggung jawabkan dan memenuhi sebagai perbuatan *money politic*. Oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:⁸⁴

1. Menyatakan terdakwa Hidayat Wijaya Dipura tersebut diatas telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemilihan kepala daerah secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hidayat Wijaya Dipura dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

⁸⁴ Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN.Srg, hlm: 35-

- a. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dengan no. simcard XL 0877726754343 IMEI 863091029637480 MEID 9900566075666 SN 585020306964;
 - b. 8 (delapan) kantong plastik besar warna hitam dan setiap 1 (satu) kantong plastik besar warna hitam berisi 25 (dua puluh lima) bungkus kantong plastik kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus mie instant merk Supermi dan 1 lembar flyer bergambar pasangan calon No. 1 atas nama pasangan calon Wahidin Halim-Andika Hazrumy;
 - c. 1 (satu) bungkus kantong plastik kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus mie instant merk Supermi dan 1 lembar flyer bergambar pasangan calon No. 1 atas nama pasangan calon Wahidin Halim-Andika Hazrumy;
 - d. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J5 Prime warna hitam IMEI 353421085707967;
 - e. 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 1859-2005-1212
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Afrizal Nur CH;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor:157/Pid.Sus. Pemilu/2017/PN.Srg. Selanjutnya penasihat hukum bersama terdakwa mengajukan upaya hukum banding.⁸⁵ Adapun alasan banding terdakwa tidak

⁸⁵ Upaya hukum banding yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk diperiksa ulang pada pengadilan yang lebih tinggi karena tidak puas atas putusan pengadilan negeri (Pasal 67 jo Pasal 233 KUHP).

menerima putusan di pengadilan tingkat pertama, sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding nomor: 9/Akta.Pid/2017/PN.Srg, adalah sebagai berikut :

1. Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 157/Pid.Sus. Pemilu/2017/PN.Srg tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta persidangan, majlis hakim terfokus pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, sedangkan keterangan saksi-saksi yang sah adalah keterangan saksi di persidangan, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*) sesuai jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan : “Apabila Hakim (*Judex facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);
2. Majlis hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan mengesampingkan keberatan penasihat hukum terdakwa mengenai saksi mahkota.
3. Penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majlis hakim yang menyatakan jaksa tidak memasukan dan menguraikan tentang syarat formil penanganan tindak pidana pemilu dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Serta tidak dilakukannya klarifikasi terhadap terdakwa Hidayat Wijaya Dipura tidak lantas membuat surat dakwaan

batal demi hukum karena sebagaimana dalam putusan sela bahwa dakwaan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana pasal 143 ayat 2 KUHAP.

Berdasar hal tersebut diatas, penasihat hukum bersama terdakwa mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding/ terdakwa Hidayat Wijaya Dipura untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Perkara No. 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN.Srg tertanggal 16 Maret 2017 atas nama terdakwa Hidayat Wijaya Dipura, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan pemohon banding terdakwa Hidayat Wijaya Dipura tersebut diatas, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum;
4. Menyatakan pemohon banding terdakwa Hidayat Wijaya Dipura dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijpraak*) atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvolging*);
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat pemohon banding/ terdakwa Hidayat Wijaya Dipura pada keadaan semula;
6. Menetapkan biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Terhadap memori banding, Jaksa penuntut umum menanggapinya dalam kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Jaksa penuntut umum keberatan penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya adalah tidak berdasar hukum dan hanya merupakan kesimpulan pribadi dari terdakwa sendiri, cenderung subjektif dan tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
2. Jaksa penuntut umum keberatan penasihat hukum terdakwa tentang pemeriksaan saksi mahkota di persidangan adalah keberatan yang tidak berdasarkan hukum , kurang teliti dan tidak cermat dalam menafsirkan Pasal 168 dan Pasal 169 ayat (1) KUHAP;
3. Jaksa penuntut umum keberatan penasihat hukum terdakwa terhadap masalah proses penanganan perkara pemilu tidak dimasukan kedalam surat dakwaan merupakan ketidakcermatan dalam pola penanganan perkara di sentra gakumdu Kabupaten Serang;
4. Jaksa penuntut umum berpendapat keberatan penasihat hukum terdakwa terhadap masalah penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa yang tidak tepat jauh dari azas keadilan, karena judex facti Pengadilan Negeri Serang telah mengadili perkara a quo sudah benar, tepat dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Tujuan pidanaan menurut Nigel Walker adalah pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata karena kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan;
6. Jaksa penuntut umum mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara a quo betul-betul mempertimbangkan secara obyektif dan dengan hati nurani demi kebenaran dan keadilan yang berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian diatas jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menolak permohonan dari penasihat hukum terdakwa Hidayat Wijaya Dipura/pembanding (pemohon banding);
2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Serang No. 157/Pis.Sus.Pemilu/2017/PN.Srg tanggal 16 Maret 2017;

Setelah hakim Pengadilan Tinggi Banten mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, Berita acara persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/PN.Srg, memori banding penasihat hukum terdakwa dan kontra memori banding jaksa penuntut umum, majlis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majlis hakim tingkat pertama telah secara tepat dan benar, dimana perbuatan terdakwa tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tindak pidana dalam pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.⁸⁶ Kemudian pertimbangan hukum dalam putusan a quo diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh majlis hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa harus diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:⁸⁷

⁸⁶ Isi Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP: dipidana sebagai pembantu kejahatan yaitu *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.*

⁸⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 32/Pid.Pemilu/2017/PT.Btn, hlm. 16-18

Pertama, majelis hakim tingkat banding mempunyai pertimbangan berbeda terkait lamanya pidana. Majelis hakim pengadilan tingkat pertama menjatuhkan pidana minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun lamanya pidana tersebut menurut majelis hakim tingkat banding tidak setimpal dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan dengan melihat serta memperhatikan posisi terdakwa yang berada pada posisi dan lapis terbawah dan ujung tombak yang membagikan 25 plastik hitam mi instant merek Supermi yang seluruhnya berjumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) bungkus mi disertai dengan flyer bergambar pasangan calon (Paslon) Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten No. urut 1 atas nama paslon Wahidin Halim-Andika Hazrumy. Pihak atau orang yang berada pada lapis atas dan yang lebih berpengaruh daipada terdakwa sama sekali tidak disentuh oleh hukum, sehingga seolah-olah ada perlakuan diskriminatif in cassu pada diri terdakwa;

Kedua, majelis hakim tingkat banding perlu untuk memperhatikan dan menerapkan putusan rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015, untuk rumusan hukum kamar pidana, yang pada pokoknya memberikan peluang kepada hakim untuk memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi keentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Ketiga, sebelum majelis hakim tingkat banding menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan

yaitu terdakwa menodai azas pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten yang mempunyai sifat langsung, umum, bebas dan rahasia. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu:

1. Terdakwa mengaku dan bersikap terus terang atas perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang sangat memerlukan kehadiran terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan majlis hakim tingkat pertama diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan menguatkan putusan. Selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten memberikan putusan sebagai berikut:⁸⁸

1. Menerima permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN.Srg tanggal 16 Maret 2017, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan terdakwa Hidayat Wijaya Dipura tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemilihan kepala daerah secara bersama-sama”;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus

⁸⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 32/Pid.Pemilu/2017/PT.Btn, hlm. 18-19

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- c. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;
- d. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dengan no Simcard XL 0877726754343 IMEI 863091029637480 MEID 9900566075666 SN 585020306964;
- 2) 8 (delapan) kantong plastik besar warna hitam dan setiap 1 (satu) bungkus plastik besar berisi 25 (dua puluh lima) bungkus kantong plastik kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus mie instant merk Supermi dan 1 lembar flyet bergambar pasangan calon No. 1 atas nama pasangan calon Wahidin Halim-Andika Hazrumi;
- 3) 1 (satu) bungkus kantong plastik kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus mie instant merk Supermi dan 1 lembar flyer bergambar pasangan calon No.1 atas nama pasangan calon Wahidin Halim-Andika Hazrumy;
- 4) 1 (satu) buah handphone merk Samsung type j5 Prime warna hitam IMEI 353421085707967;
- 5) 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 1859-2005-1212;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Afrizal Nur CH alias Rizal Bin Chudhari;

- f. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5000,00
(lima ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS *MONEY POLITIC* DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN NOMOR: 32/PID.PEMILU/2017/PT.BTN.

A. Aspek Tindak Pidana atau *Jarīmah*

Dalam perspektif hukum positif, *money politic* merupakan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III dalam putusan Nomor 32/Pid.Pemilu/2017/Pt.Btn terdakwa Hidayat Wijaya Dipura telah terbukti melakukan perbuatan *money politic*. Dalam putusan tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama telah secara tepat dan benar membuktikan semua unsur dakwaan berupa unsur setiap orang, unsur sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, unsur mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu dan unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan.

Berdasar unsur-unsur tersebut menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Pelanggaran atas pasal tersebut diancam dengan hukuman yang diatur dalam pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena

itu pertimbangan hukum dalam putusan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili kecuali lamanya pidana.

Sedangkan dalam konsep hukum pidana Islam menurut Ahmad Wardi Muslich,⁸⁹ Suatu perbuatan baru bisa dikatakan *jarimah*, apabila sudah memenuhi unsur-unsur berupa: unsur formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman, unsur material yaitu adanya tindak laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif) dan unsur moral adalah orang yang cakap (*mukallaf*), yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih dibawah umur maka ia dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani. Adapun perbuatan *money politic* yang dilakukan Hidayat Wijaya Dipura sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 32/Pid.Pemilu/2017/Pt.Btn dapat dikategorikan sebagai *jarimah* dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, berdasar unsur formal perbuatan *money politic* dalam hukum Islam memang tidak ada aturan yang tegas melarangnya namun bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan terhadap larangan terhadap *money politic* ini. Mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas pemahaman nash al-Qur'an maupun as-

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2004), hal. 28

Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap *zamān* (waktu) dan *makān* (ruang) manusia.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam bab II perbuatan *money politic* terdapat unsur memberikan uang atau barang guna mempengaruhi seseorang untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu. Secara umum tindakan seseorang mempengaruhi objektivitas seseorang yang lain dengan menggunakan materi disebut tindakan suap atau *risywah*. Sedangkan *risywah* sendiri memiliki dasar hukum yang melarangnya berupa hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi:

عن عبد الله بن عمر وقال: لعن رسول الله ﷺ الراشي و المرتشي (رواه الترمذي)

“Dari Abu Hurairah r.a. dia telah berkata: “Rasulullah SAW telah mengutuk orang yang suka memberi suap dan orang yang suka menerima suap”(HR. Tirmizi).⁹⁰

Kedua unsur material, menurut Ahmad Hanafi,⁹¹ suatu perbuatan dianggap *jarīmah* apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik, atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Dalam hal ini Hidayat Wijaya Dipura terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa membagikan 25 plastik hitam mi instant merk Supermi yang seluruhnya berjumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) bungkus mi disertai dengan flyer bergambar pasangan calon Gubernur Banten dan Wakil Gubernur

⁹⁰ Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (juz II, No. 3580) (Beirut: Dar al Fikr, 2007), hlm. 324.

⁹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm.2

Banten No. Urut 1 atas nama paslon Wahidin Halim–Andika Hazrumi. Adapun tujuan dari pembagian bingkisan tersebut sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu atau tidak memilih pasangan calon tertentu.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam bab II perbuatan *money politic* yang dilakukan Hidayat Wijaya Dipura tersebut juga memiliki dampak negatif berupa makin tingginya biaya politik, korupsi dan rusaknya tata demokrasi. Oleh karena itu pemberi, perantara dan penerima berhak mendapatkan hukuman.

Ketiga, berdasar unsur moral yang dapat dikatakan sebagai pelaku *jarīmah* yaitu orang yang cakap dan mampu bertindak, dalam hukum Islam disebut *mukallaf*. Menurut Abdul Wahab Khallaf,⁹² *mukallaf* ialah seorang muslim yang telah akil baligh (dewasa). Dalam Ushul Fiqih *mukallaf* disebut juga *al-mahkum 'alaihi* (subyek hukum) yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangan-Nya. Secara fisik dan rohani. Syarat *mukallaf* meliputi berakal, cukup umur dan orang yang mempunyai kemampuan bebas (*mughtar*). Sedangkan secara pengetahuan, syarat *mukallaf* meliputi pelaku sanggup memahami *nās-nās syara'* yang berisi hukum taklifi, dan merupakan orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman.⁹³

⁹²Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Ilmu Ushul Fiqih), Ed.1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2000), Cet-7, hlm. 3.

⁹³Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 67

Berdasarkan uraian diatas terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang *mukallaf*. Karena jika dilihat dari segi usia terdakwa berusia 39 (tiga puluh sembilan) tahun saat melakukan perbuatan dan usia tersebut menurut imam empat madzab Islam sudah melebihi batas usia *baligh*.⁹⁴ Selanjutnya terdakwa juga merupakan orang merdeka yang tidak gila dan berakal sehingga secara pengetahuan terdakwa merupakan orang yang sanggup memahami *nās-nās syara'*.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam paragraf-paragraf terdahulu, *jarīmah* dibagi menjadi 3 (tiga):⁹⁵

4. *Qīṣās-Diyāt*, yaitu tindak kejahatan yang sanksi hukumannya adalah balasan setimpal (*qīṣās*) dan denda darah (*diyāt*). Contohnya pembunuhan dan penghilangan anggota tubuh.
5. *Hudūd*, yaitu kejahatan yang sanksi hukumannya ditetapkan sendiri secara pasti oleh Allah dan/atau Rasul. Contohnya pencurian, perampokan, perzinaan dll.

⁹⁴ Berikut adalah pendapat imam 4 (empat) *madzab* mengenai usia *baligh* : Menurut ulama' Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah *ihṭilām* (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnya umur baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Menurut ulama' Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haid dan hamil. Menurut ulama' Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani. Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun. Menurut ulama' Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu : a. Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh b. Mencapai usia genap 15 tahun. c. Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil. Dan bagi banci (*khunṭsa*) diberi batasan usia 15 tahun.. dikutip dari *Buku Panduan Ujian Komprehensif S1 Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Walisongo Semarang 2017*, hlm: 181

⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 256-257.

6. *Ta'zīr*, yaitu kejahatan lain yang tidak diancam dengan *qisās-diyāt* dan tidak pula dengan *hudūd*. Dalam hal ini ancamannya ditetapkan oleh imam atau penguasa.

Perbuatan *money politic* yang dilakukan oleh Hidayat Wijaya Dipura merupakan *jarīmah ta'zīr* karena 3 (tiga) hal sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Wardi Muslich, yaitu:⁹⁶

1. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan dosa atau maksiat.

Perbuatan Hidayat Wijaya Dipura merupakan perbuatan dosa sebagaimana unsur-unsur *money politic* sama dengan suap (*risywah*). Adapun larangan terhadap *risywah*, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan hakim, Rasulullah SAW bersabda:

وعن ثوبان قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي و المرتشي والرائش (رواه أحمد والحكم)

“Dari tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya” (HR. Ahmad dan hakim).⁹⁷

2. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu *money politic* mempunyai banyak dampak negatif salah satunya rusaknya tatanan demokrasi. Jika tatanan demokrasi telah rusak maka asas pemilu yang

⁹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.255

⁹⁷ Muhammad bin Ismail Kahlani Ash-Sau'ani, *Subul As-salam* (Bandung: Dahlan,tt), hlm. 43.

berupa “Luber dan Jurdil”⁹⁸ akan terganggu dan menimbulkan bahaya bagi kepentingan masyarakat.

3. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Perbuatan *money politic* yang dilakukan Hidayat Wijaya Dipura merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang yaitu melanggar pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

B. Aspek Hukuman atau ‘*Uqūbah*

Money politic dalam hukum pidana Indonesia merupakan bentuk pelanggaran terhadap pemilu/pilkada. Penerapan sanksinya pun sangat mempertimbangkan rasa keadilan agar tidak diulangnya lagi. Majelis hakim dalam persidangan harus memiliki keadilan dalam memutuskan dan mempertimbangkan hukum, sebagaimana yang terdapat pada firman Allah SWT surat An Nisa ayat 135:6:

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

Artinya: “jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan”

⁹⁸ Asas Pemilu berupa “Luber dan Jurdil” menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, meliputi: a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. b. Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian). c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun. d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan 58 dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot). e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab III Hidayat Wijaya Dipura telah terbukti melanggar pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Pelanggaran atas pasal tersebut diancam dengan hukuman yang diatur dalam pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian terdakwa telah melakukan tindak pidana *money politic*. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Banten No. : 32/Pid.Pemilu/2017/PT.Btn terdakwa dipidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hukuman pidana penjara yang terdapat dalam Pengadilan Tinggi Banten lebih ringan 24 (dua puluh empat) bulan dari putusan Pengadilan Negeri Serang yang menjatuhkan hukuman selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

Menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama berupa pidana minimal sebagaimana diatur dalam pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Melihat posisi terdakwa yang berada pada posisi lapis terbawah dan ujung tombak yang membagikan 25 plastik hitam mi instant merk Supermi yang seluruhnya berjumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) bungkus mi disertai dengan flyer bergambar pasangan calon (paslon) Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten No. Urut 1 atas nama paslon Wahidin Halim– Andika Hazrumi. Sedangkan pihak atau orang yang berada pada lapis atas dan yang lebih

berpengaruh dari pada terdakwa sama sekali tidak desentuh oleh hukum. Seolah-olah ada perlakuan diskriminatif pada terdakwa.⁹⁹

Majelis hakim tingkat banding sebelum menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud diatas mengutip kepada putusan rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015, yang pada pokoknya memberikan peluang kepada hakim untuk memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.¹⁰⁰

Secara aturan putusan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 32/Pid.Pemilu/2017/PT.Btn memang salah karena telah bertentangan dengan hukum formil yang secara tegas mengatur ketentuan minimum khusus penjatuhan pidana. Hal ini telah menyalahi asas kepastian hukum. Terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar ketentuan undang-undang yang mengatur, sesuai asas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu hukum pidana harus bersumber pada undang-undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang.

Kemudian berdasarkan asas minimal universal/minimum khusus yang merupakan penjatuhan hukuman terendah (minimal) yang bersifat umum (universal) yang berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukumannya masing-masing. Atas dasar asas tersebut maka dijamin adanya kepastian hukum dalam penerapan jenis pidana dalam hukum pidana. Artinya dengan

⁹⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 32/Pid.Pemilu/2017/PT.Btn, hlm.16

¹⁰⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 32/Pid.Pemilu/2017/PT.Btn, hlm.17

asas tersebut tentu “mengikat para hakim pada batas minimal penghukuman” yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana *money politic*. Atas dasar asas penghukuman tersebut artinya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal yang telah ditentukan undang-undang.

Namun penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim harus disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi, peran dan akibat perbuatan si pelaku. Harus diketahui bahwa “pengadilan bukanlah lembaga algojo alias lembaga penghukuman”. Pengadilan apapun adalah “lembaga untuk memberi keadilan”. Tugas hakim bukan untuk menghukum, melainkan untuk membuat putusan yang seadil-adilnya, yaitu jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa harus dipidana dengan pidana yang juga harus proporsional sesuai berat ringan tindak pidana yang dilakukannya.¹⁰¹

Dalam perkara pidana, berlaku asas pembuktian, *beyond reasonable doubt*, yang artinya, dalam menjatuhkan putusan, hakim bukan hanya terikat dengan alat-alat bukti yang sah, melainkan juga masih harus ditambah adanya keyakinan hakim.¹⁰² Inilah yang kemudian menjadi alasan oleh hakim menjatuhkan putusan yang menurutnya sesuai dengan nalar dan hati nuraninya. Jika memang menurut keyakinan hakim putusan yang diberikan itu memberikan rasa keadilan maka hal tersebut dapat saja dilakukan.

¹⁰¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009) hlm. 481.

¹⁰² Hukum Online.com, 2014, *Pro Kontra Putusan Videotron, Terobosan atau Kekeliruan?*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54043284bf38a/pro-kontra-putusan-videotron--terobosan-atau-kekeliruan>, pada tanggal 27 Februari 2018.

Menurut Chairul Huda, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali,¹⁰³ hakim terikat untuk menjatuhkan pidana antara pidana minimal dan maksimal. Namun, hakim dapat mengabaikan jika hukuman pidana minimal masih dirasa terlalu berat. Apabila kepastian hukum dan keadilan tidak dapat dipertemukan, hakim dapat mengambil sikap untuk mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

Senada dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Darmoko Yuti Witanto,¹⁰⁴ menggambarkan bahwa tidaklah haram bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan.

Seorang hakim dituntut untuk tetap profesional dalam menjalankan fungsi dan kewenangan mengadili terutama ketika ia sedang menentukan takaran pidana, karena ukuran pidana akan menjadi tolok ukur rasa keadilan bagi para pihak. Dalam menjatuhkan pidana selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan hakim juga diberi kebebasan untuk menentukan hukuman yang adil berdasarkan ukuran keadilan menurut nuraninya.

Pada kasus *money politic* yang telah penulis jelaskan dalam bab-bab terdahulu, penulis cenderung kepada pandangan yang membolehkan hakim menjatuhkan putusan yang berbeda dengan ketentuan undang-undang jika

¹⁰³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009) hlm. 494.

¹⁰⁴ Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 123.

putusan tersebut dianggap memberikan rasa keadilan bagi pihak yang berperkara dan jika tetap mengikuti aturan akan berdampak buruk bagi banyak pihak.

Sedangkan dalam hukum Islam *money politic* digolongkan sebagai *jarīmah ta'zīr*. Sebagaimana hukumannya atau '*uqubah*¹⁰⁵ tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah Swt dan Rasul-nya. sehingga hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam kehidupan manusia yang bermacam-macam berdasarkan metode-metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang. Bentuk hukuman *ta'zīr* tidak ditentukan dalam hukum Islam agar memungkinkan *waliyyul amrī* atau hakim memilih hukuman mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, maka boleh bagi hakim menghukum tidak sesuai dengan batas minimum yang terdapat dalam undang-undang, seperti dalam putusan Nomor 32/Pid.Pemilu/2017/Pt.Btn. Dengan ketentuan putusan hakim memuat rasa keadilan dan harus mengandung unsur pengajaran dan pendidikan.

Hukum Islam memandang hukuman atau '*uqūbah* sebagai balasan atau konsekuensi yang harus di terima oleh pelaku yang melanggar aturan atau yang melakukan kejahatan. Dengan adanya balasan yang diterima pelaku

¹⁰⁵ '*Uqubah* menurut Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع

Artinya Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atasketentuan-ketentuan syara'. Dikutip dari Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy*, Juz 1, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2005), hlm. 524

maka dapat diwujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh.

Dalam fikih terdapat kaidah tentang kemaslahatan yaitu :

در المفسد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”*¹⁰⁶

Pemberian hukuman dimaksudkan sebagai tindakan preventif dalam menanggulangi maraknya *money politic* dalam pemilu. Sehingga asas pemilu berupa “Luber dan Jurdil” dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat..

¹⁰⁶ Ach. Fajruddin Fatwa, dkk, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), hlm.72.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, berikut ini akan disampaikan beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan ini:

1. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam mengambil putusan Nomor: 32/Pid.Pemilu/2017/PT.Btn melihat dari segi hukum (*yuridis*) yang ada dalam putusan tingkat pertama, memori banding terdakwa, dan kontra memori banding jaksa penuntut umum. Sedangkan dari segi non hukum (*non yuridis*) seperti pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Hidayat Wijaya Dipura dalam kasus ini berada pada posisi lapis terbawah dari rantai *money politic*. Dalam putusan tersebut majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah melanggar pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Karena itu majelis hakim menjatuhkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun amar putusannya terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pidana penjara tersebut lebih rendah bahkan dibawah ketentuan hukuman minimum pasal 187A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016. Putusan majelis hakim dalam dalam hal ini mengacu kepada putusan

rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015, yang pada pokoknya memberikan peluang kepada hakim untuk memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

2. Dalam hukum Islam *money politic* merupakan *jarīmah ta'zīr*, karena tidak diatur secara eksplisit dalam *nās-nās syar'i*, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah. Ada 3 (tiga) alasan *money politic* digolongkan sebagai *jarīmah ta'zīr*: Pertama, karena *money politic* merupakan perbuatan dosa atau ma'siat. Kedua, karena *money politic* merupakan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Ketiga, karena *money politic* merupakan perbuatan pelanggaran terhadap Undang-Undang. Sebagai *jarīmah ta'zīr* maka hukumannya merupakan kewenangan pemerintah untuk menentukan, termasuk juga kewenangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten yang menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan Nomor 32/Pid.Pemilu/2017/PT.Btn.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka di akhir pembahasan ini adapun yang menjadi saran dari penulis adalah:

1. Disarankan kepada para hakim-hakim agar lebih hati-hati dalam mengambil keputusan agar menghasilkan putusan yang tepat dengan memperhatikan hukum acara dan juga mempertimbangkan posisi

terdakwa, sifat baik dan jahat dari terdakwa sesuai pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Disarankan kepada warga negara Indonesia supaya tidak terpengaruh kepada uang atau bingkisan yang diberikan paslon atau tim sukses untuk memilih calon tertentu. Karena pada dasarnya *money politic* merupakan salah satu faktor penyebab korupsi.
3. Disarankan kepada seluruh kawan-kawan Fakultas Syari'ah dan Hukum agar selalu meneliti putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan keilmuan yang di pelajari Fakultas Syari'ah dan Hukum.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya-Nya kepada penulis dapat menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana *Money Politic* (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 32/Pid.Pemilu/2017/PT.Btn).**

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

_____, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.pdf

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD,pdf

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Serang No: 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN.Srg, dikutip dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Putusan Pengadilan Tinggi Banten No: 32/Pid.Pemilu/2017/PT.Btn, dikutip dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Buku

_____, *Buku Panduan Ujian Komprehensif S1 Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Walisongo Semarang 2017*, (Semarang: UIN Walisongo, 2017).

Abu Dawud, Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy, *Sunan Abi Dawud* (juz II, No. 3580) Beirut: Dar al Fikr, 2007

Al-asqolani, Ibnu Hajar,, *Fathul Bari (Tahqiq Ibnu Baz dan Muhibbuddin al-Khotib)*, Beirut: Dar Al-Fikr, Juz 5. tt

Al-Barnawi, Ibrahim, *Hasyiah 'ala Syarh al-Ghayah ibn Qasim al-Ghazi* t.t.: t.p., t.t.

Al-Hamawiy, Ahmad Ibn Muhammad al Fayyumi, *al-Misbah al-Munîr*, Buku I, Kairo: Dâr al-Ghadda al-Jadîd, 2007.

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Khatib, Syarbini, *Mughny al-Muhtaj* Mesir: Dar al-Bab al-Halaby wa Awladuhu, 1958.
- Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sultaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Rasyid, Harun, *"Fikih Korupsi"* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Amirudin dan Zaini Bisri, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2006.
- Amrullah, Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insan Press, 1999.
- Ash-Sau'ani, Muhammad bin Ismail Kahlani, *Subul As-salam* Bandung: Dahlan, tt
- Awdah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, Kairo: Maktabah Arabah, 1963.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Intermasa, 1996
- Depag RI, *Himpunan Fatwa MUI, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal*, Jakarta, 2003.
- Djaizuli, Ahmad., *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (cet. ke-2) Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Dzajuli, Ahmad, *fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Fatwa, Ach. Fajruddin, dkk, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013.
- Goodpaster, Gary, *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*, Jakarta: USAID, 2001.
- Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlul Sunnah Wal Jamaah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Irfan, Nurul dan Musyarofah, *fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ismawan, Indra, *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta: Media Presindo. 1999.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*, Ed.1, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2000, Cet-7.
- Kumolo, Thahjo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* Bandung: PT Mizan Publika, 2015.
- Majlis Ulama Indonesia (MUI), *101 Masalah Hukum Islam, Sebuah Produk Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI)*, Surabaya: Pustaka Da'i Muda dan Majlis Ulama Indonesia MUI Provinsi Jawa Timur, 2003.
- Mamudji, Sri, *Metode Penelitian dan penelitian Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Mandzur, Ibnu, *Lisanul 'Arab*, Beirut: Dar al Shodir, tt, Cetakan I, Juz 14.
- Markof, Jhon, *Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Social dan Perubahan Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- MD, Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 1993.
- Mubarok, Jaih, *Kaidah-kaidah Fiqh Jināyah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana – Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Cetakan Pertama, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muslehuddin, Muhammad, penerj. Yudian Wahyudi Amin, *Filsaafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan* Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

- Musthofa, Ibrohim, Ahmad az Zabat dkk, *al Mu'jam al Wasith* (Majma' Lughoh 'Arobiyyah, Daru al Dakwah, Juz 1.
- Nugroho, Heru, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa* Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang,: CV. KaryaAbadi Jaya, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 10, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.
- Said, Sudirman dan Nizar Suhendra, "Korupsi dan Masyarakat Indonesia", dalam Hamid Basyaib, dkk, *Kajian Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Aksara, 2002.
- Silaban, Sintang, *Tindak Pidana Pemilu* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Sumartini, L. *Money Politics dalam Pemilu* Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syamsudin, Nur, dkk "Pemberdayaan dan Perubahan Perilaku Politik Masyarakat terhadap Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Kota Semarang", Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jumanatul Ali-Art (J-ART)
- Umam, Ahmad Khoirul, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* Semarang: Rasail, 2006.
- Unais, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir : Dar at-Turas al-Arabi, t.t.
- Witanto, Darmoko, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Bandung: ALFABETA, 2013.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta : Handika Agung, 1989.
- Zed, Mestika, *Metode penelitian kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004

Skripsi

Amanu, Mohamad, *“Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)”*, Malang: Universitas Brawijaya, 2015.

Hidayah, Mike Nur, *“Tindak Pidana Pemilu Berkaitan dengan Politik Uang pada PEMILUKADA di Jawa Timur Tahun 2008 (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No: 41/PHPU.D-VI/2008)”*. Jember: Universitas Negeri Jember, 2013.

Mahfudhi, Moh, *“Money Politic (Prespektif Hukum Islam dan Positif)”*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,

Perdana, Ananta Bagus, *“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Money Politics yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2014 (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta)”*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Putra, Dico Primatara Marga, *“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Calon Anggota Legislatif yang Melakukan Politic Uang (Money Politic) Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum (Studi Putusan No. 34/pid.B/2014/PN.LW)”*. Lampung: Universitas Lampung, 2015.

Rahman, Faris Nadisa, Turtiantoro dan SusiloUtomo, *“Makalah: Persepsi Pengaruh Money Politic dan Jaringan Sosial terhadap Perilaku Pemilih pada Kemenangan Pasangan Calon dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM dan wakilnya H. Mukh Mustamsikin, S.Ag, M.SI., (YAKIN) Studi Kasus Pemilukada kab. Kendal tahun 2010”*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

Jurnal

_____, *Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)*, Jurnal At-Turas, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015

Kurniawan, Soni dkk, *“Laporan riset dengan tema: Tingkat Melek Politik Warga Dalam pemilu 2014 Di Kabupaten Belitung”*, 2014.

Kuswindiarti, *“Pola Pembelaan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap terdakwa dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan”* JURNAL MANAJERIAL. Vol. 5, 2009.

Lomulus, Johny, *Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Langsung di Kota Bitung dalam Demokrasi Mati Suri*, Jurnal Peneitian Politik Vp. 4 No. 1 2007, LIPI.

Mieetzner, Marcuz, "Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption", *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategie Affair*. Vol.29, Number 2, Agustus 2007,

Troy, Gil, "Moneyand Politics: The Oldest Connection". *The Wilson Quarterly* 1976, Vol.21, No 3 (Summer, 1997)

Umar, Mashudi, *Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)*, Jurnal At-Turas, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015.

Internet

<http://wartakota.tribunnews.com/2018/02/19/icw-sebut-ada-30-kepala-daerah-tersangka-korupsi-2017>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54043284bf38a/pro-kontra-putusan-videotron-terobosan-atau-kekeliruan>

<http://www.negarahukum.com/hukum/tindak-pidana-pemilu.html>,

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/kasusposisi/>

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>.

Tim Pengumpul Data KPU Kabupaten Bombana, "*Dampak Politik Uang (Money Politic) Terhadap Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih Di Kabupaten Bombana*" dikutip dari nanopdf.com_grafik-sikap-responden-jika-politik-uang money.pdf.

Zoelva, Hamdan, *Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic*. http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34118878/CATATAN_TERHADAP_PENCEGAHAN_MONEY_POLITICSlibre.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1413044544&Signature=u1ddSVDSFEys7DZmSGRMfqHYGHI%3D,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Evi Nur Fitria
TTL : Bojonegoro, 14 Februari 1996
NIM : 1402026011
Jurusan : Jinayah Siyasah (Hukum Pidana dan Politik Islam)
Alamat : Rt/Rw: 01/01, Desa: Talun, Kecamatan: Sumberrejo,
Kabupaten: Bojonegoro, Provinsi: Jawa Timur..
Nomor Hp : 085648540800
E-mail : evinurfitria70@gmail.com



Menerangkan dengan sesungguhnya :

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2008 : MI Islamiyah At-Tanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro.
Tahun 2011 : MTs Islamiyah At-Tanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro.
Tahun 2014 : MA Islamiyah At-Tanwir Talun Sumberrejo Bojonegoro.

PENGALAMAN ORGANISASI

Tahun 2015-2018 : Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI)
DPC Semarang.
Status Keanggotaan : Sekretaris II
Tahun 2016 – 2017 : Generasi Baru Indonesia (GENBI) Jawa Tengah
Status Keanggotaan : Devisi Lingkungan

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 27 Februari 2018
Yang Bersangkutan

Evi Nur Fitria
NIM: 1402026011